

**FUNGSI BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) DALAM PEMBERDAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PURNA DI LAMPUNG**

Skripsi
Skripsi ini diajukan Sebagai Syarat Dalam Mencapai
Program Strata Satu (S1)



Oleh
Seli Saraswati
NPM. 1541020126
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M

**FUNGSI BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) DALAM PEMBERDAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PURNA DI LAMPUNG**

Skripsi

Skripsi ini diajukan Sebagai Syarat Dalam Mencapai

Program Strata Satu (S1)



Oleh

Seli Saraswati

NPM. 1541020126

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Dr. M. Mawardi Jafar, M.Si
Pembimbing II : Mardiyah, M.Pd

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna di Lampung

**Oleh:
Seli Saraswati**

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) adalah lembaga Non-Kementrian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. BP3TKI Lampung sebagai kepanjangan tangan dari BNP2TKI bertugas untuk melayani para TKI yang berada di wilayah kota atau kabupaten bahkan desa yang sulit dijangkau. Tugas BP3TKI yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terkoordinasi dan terintegrasi mencakup sebelum dan sesudah keberangkatan dan kepulangan. BP3TKI dianggap memiliki fungsi yakni memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan yang bertugas melakukan perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan PMI Purna, fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan serta monitoring, fungsi pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan penempatan dan perlindungan dengan meningkatkan kemampuannya dalam menempatkan untuk dapat mengelola keuangan termasuk mengembangkan usaha mikro berupa pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi seluruh kegiatan usaha pemberdayaan sarana dan prasarana pelayanan penanganan PMI Purna.

Penelitian ini diangkat dari masalah kehidupan PMI Purna yang cenderung konsumtif belum memiliki pengetahuan untuk mengelola penghasilan yang di dapat selama bekerja di luar negeri. Tujuan pemberdayaan PMI Purna agar lebih produktif memanfaatkan uang penghasilan dan kemampuan yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PMI Purna yang bersangkutan agar tidak bekerja sebagai PMI di luar negeri. Maksud kegiatan ini memberikan motivasi dan wawasan kepada PMI Purna serta memberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi produktif dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, potensi diri sendiri, maupun lingkungan sekitar. Penelitian ini bersifat kualitatif adalah penelitian yang berupa menghimpun mengolah dan menganalisis data secara deskriptif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 orang dan sampel sebanyak 10 orang dengan cara yang diambil purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini observasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa

BP3TKI telah menjalankan fungsi *enabling* atau fasilitasi hal tersebut terlihat dalam proses tahapan pemberdayaan yakni penyadaran, pembinaan dan pendampingan kepada PMI Purna melalui pelatihan kewirausahaan, keterampilan produksi, serta pengembangan usaha. Menjadikan PMI Purna berdaya guna, atau mampu mendatangkan manfaat dan kesejahteraan pada kehidupannya.

Kata kunci : Pemberdayaan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : JL. Letkol. H. Endro Suratmin Kampus Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)704030/Fax. 7804221, Kode Pos. 35131

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seli Saraswati
NPM : 1541020126
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna di Lampung.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2019

Seli Saraswati
1541020126

MOTTO

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Qs. Ar-Ra’d (13):11)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta kasih, perhatian serta member motivasi selama menuntut ilmu.

1. Ayahanda Saliman dan Ibunda Alm. Fitri Sustriwiyati tercinta yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang tak henti-hentinya mendoakanku dalam setiap munajatnya. Terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan demi kesuksesanku, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi salah satu hadiah indah untuk Ayah dan Ibu.
2. Kakak Yayan dan adik Wahyu serta Tante Nur dan Om Yasin keluarga besar Kakek Sansuwito dan Nenek Tasrukhi dan Alm. Kakek Warsito dan Alm. Suwarti telah memberikan dukungan moral ataupun materi.
3. Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2015, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniakasi.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Seli Saraswati dilahirkan di Sukarame pada tanggal 04 Oktober 1996. Penulis adalah puteri ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Saliman dan Alm. Fitri Sustriwiyati.

Jenjang pendidikan pertama penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Waydadi Bandarlampung dan tamat pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tsanawitah Negeri (MTSN) 2 Bandarlampung, dan tamat pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Bandarlampung dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

KATA PENGANTAR

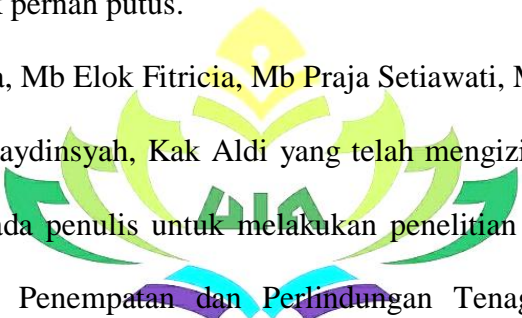
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa suatu kendala yang berarti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata I (SI). Adapun skripsi ini peneliti beri judul “**Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Lampung**”.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran pembantu Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Dr. M. Mawardi Jafar, M.Si, dan Ibu Mardiah, M.Pd yang telah banyak memberikan bimbingan dan penghargaanannya secara detail dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna.
3. Bapak H. Zamhariri, S.Ag, M. Sos.I, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
5. Orang tua ku Bapak Saliman dan Alm. Ibu Fitri Sustriyati, Om Yasin dan Tante Nur, Kakak Yayan, Kak Ferli, Wahyu, Dwi, Randi, Tante Kus, dan

segenap keluarga besar Kakek Sansuwito dan Nenek Taskrukhi, serta Keluarga Alm. Kakek Warsito dan Nenek alm. Suwarti keluarga tercinta, yang senantiasa selalu memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, bimbingan dan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril maupun materiil, yang tak pernah putus.

- 
6. Ibu Dani Rismala, Mb Elok Fitricia, Mb Praja Setiawati, Mb Asma nabila, Ibu palupi, Bapak Waydinsyah, Kak Aldi yang telah mengizinkan serta memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Lembaga Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), beserta staf BP3TKI yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan serta wawasan yang sangat berguna bagi peneliti.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Pengembanagn Masyarakat Islam kelas A dan B angkatan tahun 2015 UIN Raden Intan Lampung, Toatin, Febi, Pangestu, Elsa, Nunung, Retno, Ana, Tiara, Saadah, Ria, Euis, Sari, Uswatun, Imah, Peni, Dila, Squad KKN 46 serta teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan, bantuan moril dan materiil, dan juga selalu menyemangati tanpa lelah dalam setiap proses penyusunan skripsi.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Seli Saraswati

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah	6
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	17
F. Metode Penelitian	17
G. Teknik Analisis Data	25
H. Tinjauan Pustaka	27

BAB II Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

A. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	
1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30

2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	33
3. Pelatihan.....	38
B. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	
1. Pengertian Pemberdayaan.....	40
2. Tahap-Tahap Pemberdayaan.....	43
3. Tujuan Pemberdayaan.....	50
C. Fungsi Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan SDM.....	53
BAB III LEMBAGA BP3TKI (BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA)	
A. Gambaran Umum BP3TKI Lampung	
1. Sejarah Berdirinya BNP2TKI dan BP3TKI.....	59
2. Profil BP3TKI Lampung	63
3. Visi dan Misi BP3TKI	64
4. Tujuan dan Sasaran Strategis BP3TKI	67
5. Tugas Pokok dan Fungsi BP3TKI	68
6. Struktur Organisasi BP3TKI	71
B. Tahapan Pemberdayaan Lembaga BP3TKI terhadap PMI Purna di Lampung Timur	72
BAB IV ANALISIS FUNGSI BP3TKI DALAM PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRASI INDONESIA (PMI) Purna	
A. Fungsi BP3TKI dalam Pemberdayaan PMI Purna	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
C. Penutup	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Program Pemberdayaan PMI Purna Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung tahun 2018	77
Tabel 3.2. Program Kerja BP3TKI Lampung tahun 2018	78
Tabel 3.3 Program Pemberdayaan	86



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur Organisasi BP3TKI Lampung	70
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kepengurusan Lembaga BP3TKI	I
2. Panduan Interview	III
3. Panduan Observasi	VI
4. Panduan Dokumentasi	VIII
5. Dokumentasi Berupa Foto	IX
6. Hasil Wawancara	XI
7. Kartu Hadir Munaqosa	XXIII
8. Kartu Konsultasi	XXIV
9. Surat Pernyataan Pemberdayaan Terintegrasi Bagi PMI Purna dan Keluarga	XXV
10. Kuesioner Pre-Test dan Post-Test Pelatihan Kewirausahaan untuk PMI Purna dan Keluarga	XXVI
11. Rencana Aksi Kelompok	XXVII
12. Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) Purna dan Keluarganya Tahun Anggaran 2018	XXVIII

13. Surat Keterangan Judul Skripsi dan Penunjukan Pembimbing dari
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi XIII
14. Surat dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
XIV
15. Surat Keterangan penelitian di Lembaga BP3TKI BandarLampung... XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian dalam skripsi ini adalah: “Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna di Lampung”. Penegasan judul ini bertujuan untuk menjelaskan batasan-batasan pada istilah dan variabel dari judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

Fungsi adalah faedah, manfaat, guna, kegunaan, kapasitas, kedudukan, peranan, jabatan, dan tugas¹. Fungsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan maupun kedudukannya dalam suatu organisasi atau lembaga. Jadi fungsi disini ditekankan pada fungsi yang memiliki efektifitas dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten serta memfasilitasi sebagai pengembangan kapasitas, dengan memberikan tempat berlindung yakni subyek yang dapat melindungi, obyek yang akan dapat terlindungi, alat/instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

BP3TKI yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran

¹ Al-Barry.M.D.J. dan Sofyan hadi. AT, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 106

Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi mencakup sebelum dan sesudah keberangkatan dan kepulangan dari Pekerja Migran Indonesia. Dengan tujuan terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang profesional, bermatahat, sejahtera, dan mengarusutamakan tata kelola pemerintah yang baik. BP3TKI memiliki pembagian sistem kerja yaitu Seksi kelembagaan dan Pemasarakatan Program, Seksi Penyiapan Penempatan, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, dan Subbagian Tata Usaha.

BP3TKI digambarkan sebagai organ-organ yang menjalankan fungsi masyarakat berisikan konsep dan struktur². Fungsi ini diartikan kegunaan lembaga dan memiliki arti lain yaitu tiap-tiap bagian struktur untuk memelihara keutuhan struktur³. Memiliki sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Disini sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini harus mampu memberikan pedoman kepada masyarakat, bagaimana mereka bertindak laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokok, menjaga kebutuhan, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial (*social control*).

Fungsi BP3TKI yakni memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan yang bertugas melakukan perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan PMI Purna, fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan serta monitoring.

² Soerjono Soekamto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983) ,h. 193

³ Peter Burke, *Sejarah Teori Dan Sosial*, Terj. Mustika Zed dan Zulfani, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), Cet. Ke-2. h. 156

Serta memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan penempatan dan perlindungan, dengan meningkatkan kemampuan PMI purna dalam menempatkan untuk dapat mengelola keuangan termasuk mengembangkan usaha mikro berupa pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi seluruh kegiatan usaha pemberdayaan sarana dan prasarana pelayanan penanganan PMI. Dengan ini akan mempermudah membuka dan memberi peluang pekerjaan melalui wirausaha yang memandirikan PMI⁴.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan jenis pekerjaannya, PMI terbagi menjadi dua yaitu PMI formal dan PMI informal. PMI formal adalah PMI yang bekerja di perusahaan negara atau swasta di luar negeri yang berbadan hukum sektor seperti sektor industri, sektor perikanan, sektor perkebunan, dan sektor kesehatan. Sedangkan, PMI informal adalah PMI yang bekerja dengan perorangan bukan perusahaan negara atau swasta di luar negeri bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau juga dikenal dengan istilah *domestic worker*. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 yakni tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Purna dan Keluarganya. Perlu di lakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan PMI secara optimal, manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi hidupnya.

⁴Buku Profil BP3TKI Lampung, (Lampung : BNP2TKI, 2018), h. 23

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (kemampuan dan keunggulan bersaing) dengan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa, modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, kelompok lemah dalam masyarakat⁵. Pemberdayaan sebagai tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial serta menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya⁶.

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud oleh penulis merupakan Pemberdayaan sebagai tujuan dan memiliki tahapan perbaikan pada mutu hidup PMI baik secara fisik, mental, ekonomi, sosial dan budaya. Di laksanakan untuk memberikan peluang bagi pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya adalah suatu proses, cara dan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berusaha secara mandiri atau menjadi pekerja migran yang berkualitas, dapat lebih produktif dalam memanfaatkan penghasilan juga memiliki kemampuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya sehingga pekerja migran yang bersangkutan tidak kembali bekerja sebagai PMI di

⁵ Totok Mardikanto, H.Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2015), h. 61

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Cet. Ke-5, h. 59

luar negeri, memulihkan trauma psikis PMI purna dan keluarga yang di tinggalkan bekerja di luar negeri. Menggerakan kemampuan yang dimiliki PMI purna dan keluarga dalam berwirausaha melalui melalui pelatihan bergam ke terampilan untuk dapat berkelanjutan dan berkembang dengan mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul skripsi ini adalah studi tentang Pengembangan Kapasitas yang dilakukan oleh BP3TKI ini berupa Pelatihan Kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia Purna di Lampung. Skripsi ini akan mengungkap tentang bagaimana Fungsi Lembaga BP3TKI yang berdomisili di Bandarlampung untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan dalam memberikan pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna yang memiliki masalah perkeekonomian dan tidak memiliki pekerjaan. Dan pengembangan kapasitas atau penguatan kapasitas ini sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan serta penguatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang memahami dan melaksanakan pembangunan secara ber kelanjutan berupa pengetahuan dan keterampilan pelatihan kewirausahaan PMI dengan memberikan daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun penulis memilih judul “Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna di Lampung.

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah :

1. Penulis merasa pentingnya fungsi lembaga BP3TKI dalam melaksanakan pemberdayaan pekerja migrasi Indonesia Purna dan keluarganya untuk memberikan kesadaran pengetahuan dan wawasan yang menuju pada pengembangan kemampuan para PMI Purna dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMI purna adalah perilaku konsumtif dan belum berfikir memanfaatkan gaji sebagai modal usaha untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Perilaku boros mencerminkan hidup yang tidak baik dengan demikian perekonomian keluarga para PMI purna secara konsisten tidak beranjak menjadi lebih baik. BP3TKI menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan demi menciptakan PMI Purna yang mandiri dan terampil berdaya guna.
2. Kajian tersebut sangat relevan dengan jurusan konsentrasi penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) karena merupakan suatu sistem yang dilakukan untuk membantu dalam pemecahan suatu masalah masyarakat yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, karena didalam tulisan ini penulis akan membicarakan tentang Fungsi BP3TKI dalam pemberdayaan PMI Purna melalui pelatihan kewirausahaan.
3. Tersedianya data-data yang dibutuhkan dari tempat objek penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan dalam penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan yang tinggi serta besarnya jumlah penduduk di negara berkembang terutama di Indonesia dan rendahnya pertumbuhan penduduk di negara industri maju menimbulkan suatu peluang yang besar bagi masing-masing pihak negara tersebut untuk saling memenuhi kebutuhannya.⁷ Bagi negara-negara yang sedang berkembang besarnya jumlah penduduk dengan pertumbuhan yang tinggi bukan saja sebagai asset untuk pembangunan nasional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju yang kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu negara-negara industri maju tersebut dapat dijadikan pasar tenaga kerja yang sangat potensial bagi negara-negara berkembang.

Indonesia menempati nomor empat di dunia jumlah penduduknya terbanyak. Dengan adanya pertumbuhan penduduk Indonesia 2,32 persen per tahun yang mengakibatkan pertambahan angkatan kerja sebesar 2,70 persen pertahun, dan besarnya angkatan kerja tidak sesuai dengan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang diharapkan sehingga mengakibatkan adanya pengangguran⁸. Pengiriman tenaga kerja keluar negeri guna memenuhi permintaan yang ada diharapkan dapat membantu menampung sejumlah angkatan kerja yang menaik, sesuai lapangan usaha dan pekerjaan yang ada.

Salah satu motivasi tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri adalah upah yang relatif lebih besar dan cukup menjanjikan dari pada yang dapat diterima di Indonesia.

⁷ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.72

⁸ *Ibid.*, h.73

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah. Angkatan kerja usia muda berjumlah 27,6 juta jiwa angka ini merupakan 53% dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah 52,1 juta orang. Dan 88% dari jumlah itu hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat sekolah⁹.

Sebelum tenaga kerja dikirim ketempat kerjanya diluar negeri terlebih dahulu dilatih mental dan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Latihan mental dan keterampilan ini akan memungkinkan tenaga kerja tersebut mencapai kualitas tertentu sehingga dapat berprestasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengalaman tenaga kerja Indonesia bekerja diluar negeri dapat pula membiasakan mereka untuk bekerja produktif karena berada di lingkungan yang mengharuskan untuk bekerja keras sebagai imbalan atas gaji yang besar yang diberikam kepada mereka.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri tidak hanya akan menciptakan tenaga kerja yang produktif tetapi juga dapat menimbulkan ethos kerja termasuk kemampuan membangun lingkungannya. Ethos kerja dapat ditanamkan pada anggota keluarga masyarakat sekitar, tenaga kerja Indonesia yang telah bekerja di luar negeri diharapkan menjadi tenaga pembaharu dan perintis pembangunan di tempatnya Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri menjadi suatu pilihan kegiatan strategis bagi usaha pemecahan masalah pembangunan seperti pengangguran.

Peningkatan pengiriman tenaga kerja ini akan sangat tergantung pada kemampuan menyediakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan pasar. Semakin

⁹ *Ibid.*,h.75

meningkatkan mutu tenaga kerja semakin banyak banyak permintaan dan semakin luas lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki sehingga jumlah pengiriman tenaga kerja di Indonesia keluar negeri akan semakin besar dan devisa dihasilkan semakin meningkat. Permintaan tenaga kerja dari luar negeri dapat diperinci menurut negara peminta, jenis pekerjaan (jabatan), lapangan usaha serta jenis kelamin tenaga kerja. Dari data yang nampak bahwa pada data permintaan sebagian besar adalah pelaut 27% dan untuk pekerja dirumah tangga 19% disusul untuk tenaga-tenaga operasional seperti pengemudi dan tukang-tukang lainnya.

Hasil pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan dalam jumlah ini perlu diikuti peningkatan dalam kualitas. Jumlah tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri selama 5 tahun terakhir mencapai 293.262 orang terdiri dari 93.527 orang (32%) laki-laki dan 198.735 orang (68%) wanita¹⁰. Ditinjau dari segi pemasukan devisa negara maka dari laporan bank Indonesia yang datanya dikumpulkan dari bank-bank devisa selama 5 tahun terakhir dapat dimasukkan devisa dari transfer tenaga kerja Indonesia yang bekerja di timur tengah kepada keluarga sebesar US\$.551.523.406 disamping pemasukan dari pengiriman sebagian hasil PMI kepada keluarga diperkirakan dari pembayaran jasa pengerahan dan pengiriman tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja kepada perusahaan pengerah tenaga kerja sebesar US\$.4.286.000 per tahun.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan informasi yang diperoleh antara lain, masalah di dalam negeri

¹⁰ *Ibid.*,h.77

yakni peningkatan mutu tenaga kerja yang dikirim, dan pembinaan perusahaan pengerahan tenaga kerja Indonesia. Masalah luar negeri yakni meningkatkan pelaksanaan latihan, pembinaan perusahaan pengerah tenaga kerja, meningkatkan koordinasi dengan instansi yang erat kaitannya dengan penyediaan, pendaftaran, penetapan dan metode latihan peningkatan calon tenaga kerja.

Prosedur pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri terdiri dari berbagai tahap seperti tahap perizinan, tahap penyediaan latihan dan seleksi, tahap pemberangkatan, tahap pembinaan di tempat kerja, perlindungan dan pemulangan tenaga kerja. Pengiriman PMI keluar negeri akan tetap menjadi salah satu sarana untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Menurut proyeksi Bank Dunia, Indonesia membutuhkan tingkat ekonomi yang tinggi, untuk mengakomodasikan 15 juta tenaga kerja baru pada 2020 mendatang¹¹. Tuntutan pemenuhan hak atas pekerjaan serta hak untuk memperoleh pekerjaan secara layak belum dapat terpenuhi secara maksimal, karena kesempatan kerja di dalam negeri masih sangat terbatas. Pembangunan dan industrialisasi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak warga Indonesia yang mencari pekerjaan diluar negeri.

Penelitian yang dilakukan Disusun oleh Ayu Wulandari pada tahun 2016 penelitian ini menghasilkan pengimplementasian strategi-strategi yang dimiliki oleh BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB berjalan cukup baik. Layanan pengaduan masalah TKI melalui *crisis center*, fasilitasi *advokasi*, dan mediasi, pembinaan dan

¹¹ Buku Profil BP3TKI Lampung, (Lampung : BNP2TKI, 2018), h. 5

pemberdayaan TKI purna serta kerjasama dengan instansi terkait sudah cukup mampu dalam mengatasi permasalahan TKIB¹².

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arifiartiningsih pada tahun 2015 yang dapat ditarik kesimpulan Pemberdayaan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Proses pemberdayaan untuk mencapai tujuan dibutuhkan sinergi antara mantan BMP, komunitas/organisasi (*Migrant care*, Sari, MUIWO dan Istana Rumbia) serta pemerintah yang meliputi dinas terkait dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi yang diterima berupa rencana usaha dan berbagai pelatihan (kursus menjahit, tata rias pengantin, salon, bordir, dan pembuatan makanan kecil)¹³.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Susi Karyati pada tahun 2018 yang dapat ditarik kesimpulan berupaya meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi TKI yang berasal dari Desa Kuripan. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para stakeholder lainnya dalam upaya memperbaiki nasib para TKI

¹² Ayu Wulandari, *Implementasi Strategi Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah*, (Bandar Lampung : Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017).

¹³ Arifiartiningsih, *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, (Yogyakarta : Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

dan keluarganya yang berasal dari Desa Kuripan. Berbagai pelayanan disediakan di dalamnya untuk calon TKI, TKI, Eks-TKI atau keluarga TKI¹⁴.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan penelitian ini memiliki kesamaan penelitian diantaranya semuanya melakukan penelitian dengan menekankan dengan dilakukan upaya dan usaha untuk memperbaiki kehidupan para pekerja migrasi Indonesia dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi agar para pekerja migrasi Indonesia memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera dalam meningkatkan perekonomian.

Berbagai program yang sudah terlaksana untuk memberdayakan para pekerja migrasi yang bisa dijadikan acuan dan gambaran untuk pemberdayaan PMI yang telah terlaksana. Namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai Fungsi BP3TKI dalam Pemberdayaan PMI Purna di Lampung Timur, sementara yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menjadikan PMI Purna Lampung Timur sebagai objek penelitian dalam Pemberdayaan yang dilakukan BP3TKI melalui pelatihan kewirausahaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan jenis pekerjaannya, PMI

¹⁴ Susi Karyati, *Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Apmd), 2018).

terbagi menjadi dua yaitu PMI formal dan PMI informal. PMI formal PMI yang bekerja di perusahaan negara atau swasta di luar negeri yang berbadan hukum yakni seperti sektor industri, perikanan, perkebunan, kesehatan dan PMI Informal yang bekerja dengan perorangan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau *domestic worker*.

Meninjau jumlah PMI yang semakin meningkat dari wilayah Provinsi Lampung dan menjadikan Provinsi Lampung sebagai kantong PMI terbesar ke 4 diseluruh Indonesia. Salah satu daerah basis PMI di Lampung ialah Kabupaten Lampung Timur, dimana sejumlah kecamatan memiliki masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai PMI. Beberapa diantaranya ialah Kecamatan Way Jepara, Labuhan Ratu, Sekampung, Marga Tiga, Bandar Sribawono, dan lain-lain. Kecamatan Sekampung termasuk daerah yang banyak terdapat PMIB/TKIB, kecamatan ini telah banyak mendapatkan pelatihan pemberdayaan. Sebagai provinsi yang memiliki sejumlah daerah yang menjadi kantong-kantong PMI. Sebagai suatu perbandingan, peningkatan jumlah PMI asal Lampung. Data Jumlah PMI Provinsi Lampung Tahun 2014 berjumlah (20.355), Tahun 2015 (18.207), Tahun 2016 (18.914), Tahun 2017 (15.397), Tahun 2018 (14.160) orang PMI¹⁵. Mengalami penurunan drastis di tahun 2018.

Pekerja Migran Indonesia dihadapkan kembali dengan permasalahan setelah kepulangan dari luar negeri yang tidak memiliki pekerjaan dan menjadi pengangguran lagi dan tidak menjadikan hidupnya lebih baik tujuan utama bekerja

¹⁵ Sumber: Data www.bnp2tki.go.id

diluar negeri agar tidak kembali seperti semula sebelum bekerja di luar negeri. Kehidupan yang konsumtif dan tidak memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan penghasilan yang didapat sebagai modal mereka untuk membuka usaha yang produktif yang dapat memperbaiki perekonomian kehidupannya. Kurangnya pengetahuan dan wawasan PMI ini mengenai pemanfaatan modal yang didapat selama bekerja diluar negeri, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya memberdayakan dan mendayagunakan PMI Purna secara optimal dan manusiawi guna memperbaiki, meningkatkan, dan meluruskan pengetahuannya. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia maka pengiriman pekerja migran keluar negeri mendapat perhatian utama menjadi salah satu program penting dalam ketenagaan kerja Indonesia.

Pemberdayaan yang dilakukan untuk para PMI yakni sebagai proses pemberian atau optimasi daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik daya yang berarti kemampuan dan keberanian. Pemberdayaan yang dilakukan oleh banyak pihak terkait sering terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan karena kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan. Tentang hal ini Sumadyomerumuskan tiga upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat yang disebutnya sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan¹⁶. Serta pentingnya kelembagaan ini karena proses pemberdayaan

¹⁶ Aprilia Theresia, Krisna S. Andini, Prima G.P. Nugraha, Totok Mardikanto, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Afabeta, 2014), h.154

masyarakat pada hakikatnya merupakan proses pengembangan kapasitas yaitu pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan dan kapasitas kelembagaan¹⁷.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah merintis kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan pekerja migrasi Indonesia. Maka hadirilah program Pemberdayaan PMI, PMI Purna, dan keluarganya dilaksanakan oleh BP3TKI/LP3T terdiri dari teori dan praktek, serta melibatkan mitra serta stakeholder terkait. Program pemberdayaan PMI, PMI Purna, dan keluarganya terdiri dari 2 jenis pelatihan yaitu wirausaha mandiri yakni pelatihan ini ditujukan untuk PMI Purna dan keluarganya yang mempunyai minat untuk berwirausaha¹⁸.

Adapun program wirausaha mandiri menitik beratkan pada 4 bidang, program ketahanan pangan (peternakan, perikanan, perkebunan), industri pada ekonomi kreatif (kerajinan dan industri kreatif lainnya), industri pariwisata (kuliner, travel guide), dan industri jasa (las, menjahit, service elektronik, bengkel, salon, dan lain-lain). Tenaga Kerja Produktif yakni pelatihan ini ditujukan untuk PMI Purna dan keluarganya yang mempunyai minat bekerja di perusahaan di Indonesia.

Tahap awal BP3TKI/LP3TKI melakukan identifikasi jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan kearifan lokal. Apabila peserta berminat pada pelatihan

¹⁷ *Ibid.*,h.55

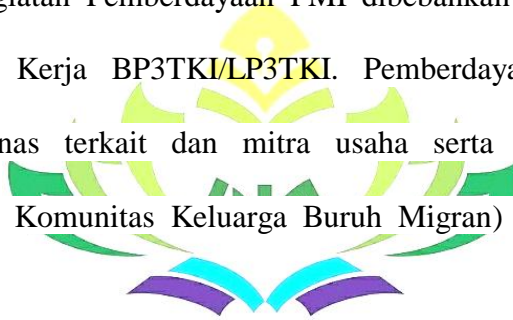
¹⁸ Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya

tenaga kerja produktif, maka harus dipastikan ada mitra atau *stakeholder* terkait yang mempersiapkan peluang kerja dalam negeri sesuai dengan minat dan potensi peserta. Adapun bila minat peserta adalah menjadi wirausaha maka harus dipastikan adanya akses pasar dan modal dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga dan *stakeholder* terkait. Lokasi pelatihan harus mudah dijangkau oleh para peserta dan ruangan pelatihan dilengkapi sarana dan prasarana memadai.

Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan terdiri dari teori dan praktek selama 6 hari, 60 menit pelajaran dengan melibatkan beberapa narasumber dari mitra atau *stakeholder* terkait. Adapun materi pelatihan terdiri dari, program pemberdayaan masyarakat yakni motivasi pelatihan dan inspirasi, pengelolaan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan usaha dan prinsip-prinsip pada kewirausahaan (*entrepreneurship*), praktek atau magang, rencana aksi atau materi dapat disesuaikan dengan standar pelatihan dari mitra/*stakeholder* terkait sesuai perusahaannya (khusus untuk Tenaga Kerja Produktif). Sebagai bentuk komitmen bersama atas pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara kelompok PMI (yang diberikan pelatihan), profesional/Mitra Industri, dan Lembaga Keuangan yang terlibat dapat kegiatan pemberdayaan) hanya boleh diikuti oleh 1 anggota keluarga dan jumlah peserta maksimal 25 orang/kelas.

Setelah program pemberdayaan bagi PMI purna dan keluarganya dilaksanakan, BP3TKI mengumpulkan komponen *output* (keluaran) dari kegiatan tersebut. Melakukan strategi pencapaian *outcomes* (hasil) melalui fasilitasi atau pendampingan bersama mitra atau *stakeholder* terkait. Pembinaan pemberdayaan

PMI, PMI Purna dan Keluarganya dilakukan bersama BNP2TKI /BP3TKI /LP3TKI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan pemberdayaan dapat berupa fasilitas pendampingan, pemberian pelatihan untuk peningkatan kapasitas usaha, akses modal, akses sarana dan prasarana, akses terhadap pasar dan lain-lain. Pembiayaan anggaran kegiatan Pemberdayaan PMI dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI/LP3TKI. Pemberdayaan PMI Purna ini terintegrasi dengan dinas terkait dan mitra usaha serta dibantu CO-KKBM (Community Organizing Komunitas Keluarga Buruh Migran) untuk memonitoring berjalannya usaha.



Seiring dengan berjalannya program pemberdayaan di wilayah Lampung ini keyakinan BP3TKI untuk dapat mendatangi kantong-kantong tempat terdapat banyak jumlah PMI dapat memberdayakan hidup PMI yang lebih baik mampu merubah serta memperbaiki ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan dapat mengurangi angka pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh BP3TKI, memunculkan sebuah pertanyaan “Bagaimana Fungsi BP3TKI dalam memberikan pemberdayaan pelatihan kewirausahaan pada PMI Purna?, pertanyaan tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul skripsi “*Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna di Lampung.*”

D. Rumusan Masalah

Masalah adalah sesuatu yang memiliki karakteristik yang harus dipecahkan dan dicari jalan keluar¹⁹. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana fungsi BP3TKI dalam memberikan pemberdayaan pelatihan wirausaha pada PMI Purna di Lampung?”

E. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana fungsi BP3TKI dalam memberikan pemberdayaan pelatihan wirausaha pada PMI Purna di Lampung.

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai kajian pemberdayaan masyarakat khususnya tentang pemberdayaan PMI purna di dalam program pelatihan kewirausahaan.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan PMI.
3. Dapat menjadi masukan dan bahan informasi serta rekomendasi bagi lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini ialah BP3TKI Lampung.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),h.18

F. Metode Peneliti

Adapun untuk memudahkan dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik itu lembaga dan organisasi kemasyarakatan social maupun di lembaga pemerintahan²⁰. Penelitian dilakukan dengan objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak bisa dimanipulasi peneliti dan kehadiran peneliti ini tidak akan mempengaruhi dinamika pada objeknya tersebut²¹.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian berupa menghimpun mengolah dan menganalisis dari data secara kualitatif. Maksudnya melakukan suatu pendekatan investigasi, peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian berdasar kan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

Berdasarkan pengertian diatas penggunaan metode kualitatif sangatlah tepat untuk mengidentifikasi pemberdayaan PMI Purna melalui pelatihan

²⁰ Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2003), Cek ke-10 h.31

²¹ Sugiyono. *Op.Cit.*, h.8

kewirausahaan karena metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus tertentu. Dilakukan dengan mendengar pandangan partisipan terkait terhadap persepsi terhadap fenomena yang akan diteliti secara holistik yakni dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research). menurut Jalaludin Rahmat, penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, juga tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penelitian ini diajukan untuk²²:

- 1) Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
- 2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
- 3) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Menurut Baydan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasil data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan orang-orang dan pelaku dapat diamati.²³ Jadi penelitian deskriptif menggambarkan kejadian yang terjadi dalam masyarakat juga mengungkapkan data yang ada padanya, memberikan analisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran masalah dihadapi.

²²Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1984), h.34

²³ *Ibid.*, h. 4

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yakni keseluruhan subyek penelitian²⁴. Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang diteliti. Jadi populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu. Karakteristik yang dimaksud adalah variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek : 45 orang yakni Anggota Pengurus Kantor BP3TKI Lampung berjumlah 20 orang pegawai dan 25 orang PMI Purna Lampung Timur.

b. Sampel

Sampel adalah pengambilan subyek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada. Sampel secara sederhana di artikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili dari seluruh populasi²⁵.

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 80

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h.114

Peneliti menggunakan *non-probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel²⁶. Dasar utamanya yakni logika dan *common-sense* (akal sehat) saja. Teknik yang dipilih yaitu²⁷ *purposive sampling* pengambilan sampel berdasarkan tujuan yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan kapasitas yang kompeten yang benar-benar paham dibidangnya di antara anggota populasi. Penggunaan teknik ini berdasarkan pengetahuan akan ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.

Jenis sampel diambil dengan pertimbangan subjektif peneliti, persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Jadi dasar pertimbangan ditentukan tersendiri oleh peneliti. Adapun kriteria sampel untuk Pengurus BP3TKI Lampung sebagai berikut :

- 1) Anggota yang berpengalaman bidang perlindungan dan pemberdayaan PMI yang telah paham akan tugasnya, seperti kemampuan dan pengetahuannya mengenai pemberdayaan serta aktif, dapat menjalankan peran dan fungsi atau tugasnya dalam pemberdayaan PMI Purna, mudah memberikan informasi, data yang diperlukan.
- 2) Telah mengikuti dan melaksanakan lebih dari 5 kali program/paket pemberdayaan di lapangan dari tahun 2015-2018.

²⁶ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 62

²⁷ *Ibid.*, h. 64

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tersebut adapun yang masuk dalam kriteria berjumlah 6 orang. Adapun PMI Purna Lampung Timur :

- 1) Anggota PMI Purna yang aktif, cepat tanggap dan memiliki ide kreatif dalam mengikuti pelatihan pemberdayaan kewirausahaan.
- 2) Anggota yang lebih dari 5 tahun berada diluar negeri dan sudah berpindah pindah tempat bekerja di tiap negara dengan cbanyak pengalaman minimal umur 30 tahun dan sudah menikah.

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tersebut adapun yang masuk dalam kriteria berjumlah 5 orang.

3. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam memperoleh data lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara mengamati orang atau tempat dilokasi riset, observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencacatan guna mem peroleh data data yang lebih konkret yang jelas²⁸. Observasi merupakan alat pengumpulan data

²⁸ Ahsannudin Mudi, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mendiata, 2004), h. 44

dengan menggunakan pengamatan atau meng indrakan secara langsung, kondisi, proses atau perilaku²⁹.

Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan. Kalau dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat langsung terlibat dan hanya sebagai pengamat insependen, maka dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Metode observasi ini digunakan untuk menggali data terkait pengamatan penulis didalam melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai pelatihan pemberdayaan BP3TKI serta hasil yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini berupa fungsi BP3TKI dan program pemberdayaan BP3TKI dalam pelatihan kewirausahaan PMI purna.

b. Interview

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pencari informasi atau pengumpulan data (peneliti) dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Menurut kartini kartono,

²⁹ Sunapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 52

interview merupakan proses kegiatan tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau langsung³⁰.

Jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan pertanyaan yang lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai harapan.

Pewawancara ini bisa menanyakan apa saja yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti³¹. Penulis melakukan interview kepada sampel penelitian untuk menggali data yang akurat. Interview yang penulis lakukan kepada sampel penelitian diantaranya; Bagaimana fungsi BP3TKI dalam program pem berdayaan yang dilakukan melalui pelatihan wirausaha untuk dapat me ningkatkan kesejahteraan ekonomi terhadap PMI purna di Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan, dan surat-surat resmi³². Penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis. Dokumentasi bentuk teks terdiri dari catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik dapat mencakup dokumen resmi, catatan

³⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 140

³¹ Kartini Kartino, *Op.Cit.*, h. 105.

³² Husaini Utsman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h.73

dalam wilayah publik dan arsip dalam perpustakaan, dokumen project.

Dokumen pribadi dapat mencakup diaries, surat, catatan pribadi, jurnal personal, foto keadaan objek yang diteliti, email. Peneliti juga harus hati-hati dalam memilih dokumen yang hendak dijadikan sumber penelitian karena tulisan sering kali tidak sistematis (dokumen pribadi), tidak akurat, ditulis dalam masa dan untuk tujuan tertentu sehingga perlu rekonstruksi. Dokumentasi juga berarti keterampilan dalam menemukan, menangani dan merinci bibliografi (sumber) dan merawat catatan yang mengklarifikasinya³³.

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen seperti surat menyurat, peraturan pemerintah, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam hal ini adalah sumber data yang merupakan data sekunder sebagai penguat penelitian berkaitan pelatihan pemberdayaan kewirausahaan PMI purna di Lampung.

d. Kuesioner

Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai, dan memperoleh informasi dengan realibilitas dan validitas setinggi mungkin.³⁴ Cara penggunaan kuesioner dalam penelitian ini diisi sendiri oleh kelompok dengan mengisi kuesioner secara serentak. Jenis pertanyaan yang diajukan ini berupa kombinasi tertutup dan


³³ Basri Ms, *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik)*, (Jakarta, Restu Agung, 1997), h. 63

³⁴ Masri dan Sofian, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), h. 175

terbuka seperti jawabannya sudah ditentukan tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Selanjutnya *Pretest* akan diadakan untuk menyempurnakan kuesioner melalui *pretest* akan diketahui berbagai hal yaitu mengetahui apakah jawaban yang diperoleh sesuai dengan yang dimaksudkan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan pelatihan pemberdayaan kewirausahaan PMI purna di Lampung.

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisa Data



Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dari uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema serta hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama analisa data adalah bagaimana men jadikan data, informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis³⁵. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan meng gambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *Thematic Analysis* dari Miles dan Huberman. Diterangkan dalam buku Emzir Dalam model ini

³⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Masdar Maju, 1996), Cet Ke-VII, h. 280

kegiatan analisis di bagi menjadi 3 tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan³⁶

a. Tahapan Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai pelaksanaan program pemberdayaan BP3TKI melalui pelatihan kewirausahaan dan program pemberdayaan PMI Purna.

b. Tahap Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti akan membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian dapat diketahui.

c. Tahap verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber³⁷, kemudian peneliti mengambil simpulan

³⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

H. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang pemberdayaan yang sudah ada dari peneliti-peneliti terdahulu. Setelah penulis mencari beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, akhirnya penulis menemukan literatur dalam bentuk skripsi dan karya ilmiah, sebagai berikut :

1. Implementasi Strategi Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Tahun 2016. Disusun oleh Ayu Wulandari (1316041013), (S1) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2017. Tujuan umum dari tesis ini adalah menggambarkan implementasi strategi BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB di Provinsi Lampung Tahun 2016 dan kendala yang dihadapi oleh BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB. Pengimplementasian strategi-strategi yang dimiliki oleh BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB berjalan cukup baik. Layanan pengaduan masalah TKI melalui *crisis center*, fasilitasi

³⁷ *Ibid.*, h.131

advokasi dan mediasi, pembinaan dan pemberdayaan TKI purna serta kerjasama dengan instansi terkait sudah cukup mampu dalam mengatasi permasalahan TKIB. Perlindungan hukum perlu ditingkatkan. Kendala-kendala BP3TKI Lampung dalam pelaksanaan strategi.

2. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. Disusun oleh Arifiartiningsih (11720036). (S1) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui Buruh Migran Perempuan (BMP) merupakan salah satu kaum yang disebut sebagai pahlawan devisa. Akan tetapi setelah kembali ke Indonesia mantan BMP seringkali di posisikan sebagai pihak yang terpinggir (marginal). Untuk melihat dan menjabarkan bagaimana bentuk pemberdayaan yang didapatkan melalui interintervensi komunitas lembaga swadaya masyarakat, organisasi lokal dan pemerintah. Pemberdayaan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Dari ketiga pendekatan tersebut diketahui bahwa pemberdayaan yang terjadi meliputi pemberdayaan ekonomi dan sosial melibatkan individu untuk individu, komunitas untuk individu, dan komunitas untuk kelompok. Pemberdayaan ekonomi yang diterima berupa rencana usaha dan berbagai pelatihan (kursus menjahit, tata rias pengantin, salon, bordir, dan pembuatan makanan kecil). Pemberdayaan sosial yang diterima berupa advokasi dan pengembangan diri mantan BMP.

3. Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Disusun oleh Susi Karyati (14510001). (S1) Program Studi Ilmu Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Apmd) Yogyakarta 2018. Pemerintah Desa Kuripan melalui Program Desmigraf (Desa Migran Produktif) yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan *Migrant Care* sejak 30 Desember 2016 berupaya meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi TKI yang berasal dari Desa Kuripan. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para *stakeholder* lainnya dalam upaya memperbaiki nasib para TKI dan keluarganya yang berasal dari Desa Kuripan. Pelaksanaan program Desmigratif ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu kedepannya diharapkan program Desmigratif mampu mengubah pola pikir dalam memilih upaya untuk memperbaiki kehidupan.

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji tentang Fungsi Balai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migrasi Indonesia Purna agar dapat hidup mandiri dan dapat memanfaatkan uang atau modal dari penghasilan yang didapat setelah bekerja di luar negeri, agar kehidupannya tidak konsumtif melalui pelatihan. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

Fungsi Lembaga Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam Pemberdayaan PMI Purna

A. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengetian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Komarudin dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen Fungsi (*Function*) didefinisikan yaitu kegunaan, pekerjaan atau jabatan, tindakan atau kegiatan perilaku dan ketegori dalam aktivitas-aktivitas. Fungsi dapat diartikan juga menunjuk pada proses yang akan berlangsung³⁸. Fungsi yang dilakukan sesuai dengan jabatan maupun kedudukannya dalam suatu organisasi atau lembaga. Maka fungsi disini adalah fungsi yang memiliki efektifitas yang dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten.

Lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia untuk memenuhi kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat³⁹. Lembaga sosial nama lainnya pranata sosial, *soziale gebilde*, sistem tata kelakuan atau norma, lembaga kemasyarakatan. Fungsi lembaga sosial sendiri yakni sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, sebagai *sosial control* yaitu sebagai sistem yang melakukan pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya⁴⁰.

³⁸ D. Hendropuspito.OC, *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta : Penerbit Kasius, 1989), h. 179

³⁹ Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 50

⁴⁰ *Ibid.*,h.53

Dilihat dari sudut fungsinya *operative institution* lembaga sosial yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, sama halnya dengan tugas yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang digambarkan sebagai organ-organ yang menjalankan fungsi masyarakat berisikan konsep dan struktur. Fungsi yang diartikan kegunaan lembaga dan memiliki arti lain yaitu tiap-tiap bagian struktur untuk memelihara keutuhan struktur.⁴¹ Memiliki sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada dimasyarakat seperti organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya. Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mampu memberikan pedoman kepada masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap didalam menghadapi masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokok, menjaga kebutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*)⁴².

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memerlukan manajemen sumber daya yang baik karena manajemen sumber daya manusia ini adalah pendayagunaan,

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983) ,h. 193

⁴² Peter Burke, *Sejarah Teori Dan Sosial*, Terj. Mustika Zed dan Zulfani, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), Cet. Ke-2. h. 156

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi, kelompok dan lembaga⁴³. Dalam sumber daya manusia memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, karya, karsa). Maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu melakukan pengembangan kapasitas atau penguatan kapasitas ini sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan serta penguatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berupa pengetahuan dan keterampilan pelatihan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai⁴⁴.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan dalam suatu lembaga. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi *Follow-up activity and evaluation*. Kemudian bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi sosial, dan ke budayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik terlebih memfokuskan kegiatan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang menekankan pada prinsip kemandirian yang artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (*grup action*) didalam memecahkan masalah dan memenuhi

⁴³ Simamora Henry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : STIE YPKN, 1997)
Dikutip Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h.5

⁴⁴ Totok Mardikanto, H.Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.69

kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga meningkatkan kualitas hidup SDM.

Fungsi yang dimaksud penulis yakni tugas yang dilakukan dalam suatu lembaga atau organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi atau lembaga dalam pencapaian tujuannya. Pentingnya bidang tugas pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukungan (*supporting*)⁴⁵. Dikembangkan dan dipelihara agar semua tugas dan fungsi lembaga dapat berjalan seimbang, merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan lembaga. Kegiatan akan berjalan lancar apabila dapat memanfaatkan fungsi tersebut.

2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi Lembaga adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam bagian-bagian dari lembaga yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan. Penguatan kapasitas entitas pada kelembagaan lebih ditekankan kepada pengembangan mutu entitas atau organisasi yang meliputi kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi, kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan atau efektivitas organisasi.

⁴⁵ Edy Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), h.95

Melihat pada proses organisasi atau pengelolaan organisasi yang meliputi⁴⁶ perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian, pengembangan jumlah dan mutu sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya informasi maupun sarana dan prasarana, diperlukan interaksi antar individu didalam organisasi, interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku pada kepentingan *stakeholders* yang lain.

Penguatan kapasitas entitas pada kelembagaan yakni melakukan peningkatan kemampuan untuk memahami nilai-nilai lembaga dan melaksanakan tugas pembangunan secara berkelanjutan. Jadi, melaksanakan tugas dan kegiatan lembaga perlu bidang tugas pendampingan sosial yang berorientasi pada proses yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tersebut, lembaga perlu 4 bidang tugas dan fungsi yang disingkat 4P, yaitu pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empeworing*), perlindungan (*protecting*), pendukungan (*supporting*).

a. Pemungkinan (*Enabling*) atau Fasilitasi

Tugas utama pekerja sosial dalam hal ini yakni menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat maupun kapasitas akan pemecahan masalahnya. Kegiatan ini memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan lembaga, dalam pemilihan atau penetapan

⁴⁶ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.72

tujuan-tujuan lembaga dan penentuan strategi, sarana serta prasarana, anggaran dan standar yang dibutuhkan.

“Pemungkinan (*Enabling*) atau Fasilitasi yakni fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini dengan melakukan mediasi dan negosiasi membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Pekerja sosial ini yang terpanggil untuk mampu memobilisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat dijangkau masyarakat. Sumber ini juga yang digunakan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup), sumber inter personal (sistem pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksi formal dengan orang lain), sumber sosial (respon yang mendukung kesejahteraan pada masyarakat).”⁴⁷

Adapun yang dimaksud penulis disini adalah adanya bantuan ini untuk memberikan akses terhadap sumber-sumber baik karena tidak ada

disekitar lingkunganya maupun yang sulit dijangkau untuk memberikan sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan dan disediakan dengan baik agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan yang dicapai yakni, Program Pemberdayaan Lembaga kepada SDM dilaksanakan pada pelatihan kewirausahaan.

b. Penguatan (*Empowering*)

Penguatan (*Empowering*) sebagai fungsi dalam pendampingan sosial pada bentuk pendidikan yang menunjuk pada sebuah proses kegiatan ketimbang sebagai sebuah hasil dari kegiatan. Pada pendampingan sosial pendidikan beranjak dari kapasitas orang yang belajar (peserta didik).

⁴⁷ *Op.Cit*, h.95

Pendidikan merupakan bentuk kerja sama pekerja sosial sebagai guru dan pendamping dengan murid dan peserta didik. Pengalaman adalah inti pelajaran pemberdayaan.

“Penguatan (*Empowering*) yakni berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping yang berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.”⁴⁸

Penguatan (*Empowering*) diperlukan untuk menjalankan sebuah pelatihan kewirausahaan dengan pembelajaran sebagai proses saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Pekerja sosial peserta didik partner yang memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Memberikan tanggung jawab kepada pengurus akan tugasnya menjalankan program lembaga pemberdayaan masyarakat.

c. Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan (*Protecting*) yakni berkaitan antara pendamping dengan lembaga eksternal atas nama dan kepentingan dari masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsulan orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses

⁴⁸ *Ibid.*, h.96

pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini sebagai proses untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan yang diperlukan. Perlindungan (*Protecting*) yang dilakukan sebagai bagian dari kerja sama saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah dalam perlindungan sosial.⁴⁹

Menurut penulis sendiri Perlindungan (*Protecting*) merupakan perlindungan sosial yang menjadi elemen penting dalam strategi kebijakan sosial. Perlindungan sosial sebagai seluruh tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, melindungi kelompok rentan dalam menghadapi kehidupannya dan meningkatkan status sosial serta hak kelompok ter marginalisasi. Merujuk kepada kebijakan, intervensi, yang pemerintah lakukan dalam menyediakan perlindungan. Dimana pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya dalam kebijakan publik.

Dasar perlindungan dan hukum lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan legal yang sangat kuat, bukan saja sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan nasional lainnya, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan berbagai Konvensi Internasional yang telah ditarifikasi oleh pemerintah. Seluruh komponen yang berada dalam satu system dari lembaga tersebut bekerja bersama mencapai serta mewujudkan tujuan lembaga

⁴⁹ *Ibid.*, h.97

d. Pendukungan (*Supporting*)

Pendukungan (*Supporting*) yakni fungsi yang mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping disini tidak hanya dituntut untuk mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok melainkan mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan analisis sosial mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, mencari serta mengatur sumber dana⁵⁰.

Fungsi Pendukungan yang diambil dari sudut pandang definisi ini sangat vital dalam suatu lembaga. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai rencana yang sudah direncanakan lembaga. Jadi Pendukung an (*Supporting*) yang di lakukan mengacu pada saat proses. Dengan pendukungan diharapkan juga agar mampu mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat dengan semua unsur yang membuat kehidupan mandiri dan sejahtera.

Lembaga pemberdayaan masyarakat juga melakukan Pendukungan (*Supporting*) dari pemberian pelatihan kewirausahaan pada SDM. Di samping itu, hal tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja mereka agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan meningkatkan pemberdayaan yang ada di lembaga, sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas, fungsinya masing-masing, dalam hal ini adalah petugas dalam

⁵⁰ *Ibid.*, h.98

melakukan pendampingan saat melakukan pelatihan. Serta untuk kemudahan dan efektifitas maka pekerjaan tersebut di bagi sesuai dengan bagian keahlian dan kompetensi petugasnya dan meng optimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja lembaga.

Fungsi dan tugas yang dilakukan lembaga pemberdayaan masyarakat yakni Pemungkinan (*Enabling*) atau Fasilitasi dalam Pemberdayaan ini berupa pelatihan yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk melakukan perubahan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dan program-program. Dimana masyarakat memiliki kesempatan ditempatkan sebagai subyek dan terlibat aktif.

3. Pelatihan

a. Pengertian Pelatihan

Menurut Edwin B. Flippo pelatihan adalah proses membantu pegawai untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan yang digeluti sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan, fikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap.⁵¹ Sementara, Edrew E. Sikula mengemukakan bahwa pelatihan (*training*) adalah suatu proses pendidikan dalam kurun waktu yang singkat dan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas.⁵²

⁵¹ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013),

⁵² A. Anwar Prabu Mmangkunegara, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya*

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu aktifitas pendidikan dalam mengembangkan wawasan, sikap ataupun kecakapan dan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat serta terorganisir.

b. Tujuan Pelatihan

Adapun tujuan umum dari pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional ;
- 2) Mengembangkan keterampilan/keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif;
- 3) Mengembangkan atau merubah sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama dengan sesama anggota dan pimpinan.⁵³

c. Metode Pelatihan

Menurut Bernadian dan Rusell menglompokkan metode-metode pelatihan atas dua kategori, yaitu *informational methods*, dan *experientak methods*.

- 1) *Informational Methods* menggunakan pendekatan satu arah, dimana informasi disampaikan oleh para pelatih (fasilitator) kepada para peserta (masyarakat atau wanita disabilitas).
- 2) *experiental methods* atau metode praktik, adalah metode yang mengutamakan komunikasi yang luwes, fleksibel dan lebih dinamis, baik dengan instruktur, dengan sesama peserta, dan langsung mempergunakan alat-alat yang tersedia.

Manusia (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.51.

⁵³ Sedarmayanti, *Op.Cit*, h.170.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan menggunakan pendekatan satu arah ataupun pendekatan praktik.

B. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah terminologi yang semakin mendapatkan tempat dalam perspektif upaya untuk melakukan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara etimologi pemberdayaan berakar pada kata ‘daya’ atau kekuatan, dengan demikian pemberdayaan mengandung arti suatu proses untuk memberikan daya atau kemampuan terhadap individu atau kelompok yang kurang atau tidak memiliki ‘daya’, kekuatan atau kemampuan. Menurut Slamet sebagaimana dikutip oleh Oss M. Awas bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri⁵⁴.

Istilah mampu disini mengandung makna faham, berdaya, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, bekerjasama, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sementara itu menurut Dharmawan dalam buku Aprillia Theresia dkk mendefinisikan pemberdayaan sebagai *“a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decions, and to more easily acces*

⁵⁴ Oss M. Awas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),h.49

to a source of better living".⁵⁵ Karena itu, Swift dan Levin menyimpulkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk : *Pertama*, memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkat kan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan *Kedua*, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan tersebut melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan disini dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan me ngontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitas nya terhadap sumber-sumber terkait pekerjaannya, aktifitas kehidupan sosialnya.

Pemberdayaan sumber daya manusia (*Empowering of Human Resources* atau *Empowerment of Human Resorces*) merupakan suatu aspek manajemen yang sangat kunci dan strategis karena SDM menunjukan daya yang bersumber dari yang akan memberi daya terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen untuk mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan. Pemberdayaan sumber daya manusia⁵⁶ yakni daya yang bersumber dari manusia berupa tenaga atau kekuatan ada pada diri manusia sendiri yang digambarkan dengan miliki kemampuan untuk

⁵⁵ Aprillia Theresia dkk, *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.116

⁵⁶ Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : LAN, 2007), h.13

membangun artinya ini untuk bisa maju dan positif dalam setiap kegiatan usaha.

Pemberdayaan mampu membangun berarti “Daya” *energy* dan *power* dan adanya kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, profesional dan penuh tanggung jawab. Dari pengertian SDM ini menunjukan bahwa tidak semua manusia dapat disebut SDM karena manusia yang tidak memiliki daya dalam arti ke mampuan maka itu tidak layak disebut SDM. Sebagai suatu proses kegiatan usaha untuk memberdayakan “Daya Manusia” melalui perubahan dan perkembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidence*), wewenang (*authority*), dan tanggung jawab (*respons ibility*) rangka melaksanakan kegiatan atau aktivitas lembaga untuk meningkatkan kinerja yang diharapkan⁵⁷.

Penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan secara umum memiliki sisi politik dimana pemberdayaan dipahami sebagai perwujudan kemampuan pada masyarakat untuk mampu dan berani menyuarakan pendapat, ide dan gagasan-gagasannya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan nya dihadapan pemerintah atau penguasa politik. Dan dimensi sosial ekonomi dimana pemberdayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan dan kemandirian mereka di dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan dengan demikian terkait erat dengan upaya peningkatan kapasitas dan potensi-potensi yang mereka miliki. Pada pemberdayaan sumber daya manusia akan tercapainya tujuan sangat ditentukan oleh usaha manusia baik dalam

⁵⁷ *Ibid.*,h.14

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Artinya manusia yang memiliki daya kemampuan sesuai tuntutan kebutuhan dalam setiap kegiatan sehingga terwujud yang diharapkan.

Adapun konteks perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, konsep pemberdayaan secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di segala bidang secara mandiri, serta memperoleh kesempatan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas mutu hidupnya.

2. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pada hal ini penulis meminjam teori dari Ayub M. Padangaran, tentang tahap-tahap pemberdayaan, karena fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam tugasnya ini berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan, karena merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan kegiatan pelatihan kewirausahaan PMI Purna agar bisa terlaksana secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan tahap-tahap pemberdayaan. Pengembangan masyarakat merupakan proses penguatan dan pemberi kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya, ketiga tahap itu adalah :

- a. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- b. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
- c. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri⁵⁸.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya aktor atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

Proses perubahan perilaku telah banyak dijelaskan oleh para ahli perilaku, menurut Roger (1962) yang mengembangkan teori dari Lewin (1951) tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan dimana perubahan tersebut dilaksanakan. Roger menjelaskan 5 tahap dalam perubahan, yaitu⁵⁹: kesadaran, keinginan, evaluasi, mencoba, dan penerimaan atau dikenal juga sebagai AIETA (*Awareness, Interest, Evaluation, Trial and Adoption*). Menurut Roger E untuk mengadakan suatu perubahan perlu ada langkah yang ditempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan dapat tercapai. berikut langkah-langkah tersebut antara lain⁶⁰:

⁵⁸ Ayub M. Padangaran, *Manajemen proyek pengembangan masyarakat, konsep teori dan aplikasi*. (Unhalu Press, November 2011), h. 31

⁵⁹ Irwan, *Etika dan Perilaku Kesehatan*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2017), h. 195

⁶⁰ *Ibid.*, h. 196

- 1) Tahap *awareness* (kesadaran). Tahap ini merupakan tahap awal yang mempunyai arti bahwa dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran dalam diri untuk berubah apabila tidak ada kesadaran untuk berubah. Maka tidak mungkin tercipta suatu perubahan.
- 2) Tahap *interest* (keinginan). Tahap yang kedua dalam mengadakan perubahan harus timbul perasaan minat terhadap perubahan yang dikenal. Timbul minat berupa keinginan dari dalam hati yang dapat mendorong dan menguatkan kesadaran diri untuk berubah.
- 3) Tahap *evaluasi* (evaluasi). Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap suatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan. Evaluasi ini dapat memudahkan tujuan dan langkah dalam melakukan perubahan.
- 4) Tahap *trial* (mencoba). Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap suatu yang baru atau hasil perubahan dengan harapan suatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada dan memudahkan diterima oleh lingkungan.
- 5) Tahap *adoption* (penerimaan). Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perubahan yaitu proses penerimaan terhadap suatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari suatu yang baru sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan.

Pembentukan perilaku merupakan bagian yang sangat penting dari usaha mengubah perilaku seseorang. Langkah yang perlu diambil untuk merubah perilaku

setelah seseorang menyadari untuk merubah perilaku nya, maka proses selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengganti. Mengganti merupakan proses melawan bentuk keyakinan, pemikiran, dan perasaan yang diyakini salah. Setelah itu mengintrospeksi merupakan proses dimana seseorang membuat penilaian mengenai apa yang sudah diraih dan apalagi yang perlu untuk dilakukan. Dalam proses perubahan akan terjadi akan ada sebuah siklus.

Siklus dalam sistem perubahan tersebut itulah yang dinamakan sebuah proses yang akan menghasilkan sesuatu dan berdampak pada sesuatu. Pada proses perubahan terdapat komponen yang satu dengan yang lain dapat mempengaruhi seperti perubahan perilaku sosial, perubahan structural dan intitusional dan perubahan teknologi⁶¹. Proses perubahan dapat saling mempengaruhi komponen yang ada, sebagaimana dengan adanya berupa bantuan akses sarana dan prasarana tepat guna maka di masyarakat akan terjadi perubahan dalam perilaku kehidupan sosial ekonominya.

Kemungkinan masyarakat akan dapat menggunakan bantuan yang diberikan. Perilaku sosial ekonomi yang ada di masyarakat akan dapat berubah structural institusional dari sistem organisasi yang ada di masyarakat. Untuk mencapai perubahan perilaku, ada beberapa cara yang bias ditempuh, yaitu dengan paksaan cara ini bisa dilakukan dengan mengeluarkan instruksi atau peraturan, dan ancaman hukuman tidak mentaati instruksi atau peraturan tersebut.

⁶¹ *Ibid.*, h. 199

Pemberian imbalan, dengan imbalan bisa berupa materi seperti uang atau barang, tetapi bisa juga imbalan yang tidak berupa materi, seperti pujian, dan sebagainya. Dalam hal ini orang berbuat sesuatu karena terdorong atau tertarik oleh imbalan tersebut, bukan karena kesadaran atau keyakinan akan manfaatnya. Dengan membina hubungan baik. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang atau dengan masyarakat. biasanya orang tersebut atau masyarakat akan mengikuti anjuran kita untuk berbuat sesuatu, karena ingin memelihara hubungan baiknya dengan kita. Dengan menunjukkan contoh-contoh. Salah satu sifat manusia ialah ingin meniru karena itu usahakanlah agar usaha yang dibangun dapat maju dan sukses berperilaku dengan memiliki semangat tinggi dan persaingan sehat dan memberikan kemudahan.

Strategi perubahan perilaku dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan ini merupakan kemudahan bagi masyarakat, maka diharapkan masyarakat akan tergerak untuk memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan. Setelah menanamkan kesadaran dan motivasi dalam hal ini individu, kelompok, dan masyarakat, diberi pengertian yang benar tentang pengembangan kapasitas yang ada pada diri mereka. Diharapkan bisa membangkitkan keinginan mereka untuk dapat memperoleh kemampuan berupa *lifeskill* dengan pelatihan yang diberikan membantu memperbaiki perekonomian, memberikan mata pencaharian.

Penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih

baik. Dengan adanya semangat diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi. Pada tahapan penyadaran dapat dilakukan pencerahan seperti sosialisasi dengan diskusi menyampaikan apa yang mereka inginkan, dorongan berupa motivasi dari orang yang sudah terlebih dahulu menyadari suatu hak untuk berkapsitas menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan berhasil melakukannya, hal tersebut menjadi salah satu upaya

untuk mengangkat kesadaran diri.

Tahap kedua yaitu tahap pengkapasitasan proses transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan, dengan penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan. Kemudian pada tahapan pengkapasitasan, setelah masyarakat sudah menyadari hak mereka untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik kemudian masyarakat diupayakan untuk diberikan kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, sistem nilai dan sistem aturan main.

Kemampuan berupa pengetahuan dalam berpikir lebih luas dalam artian diberikan wawasan tentang potensi yang mereka miliki, kemampuan keterampilan

setelah mengetahui potensi apa yang ada disekitar atau yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan melalui keterampilan ataupun pengetahuan yang telah didapatkan untuk kemudian difasilitasi dalam mengembangkan keterampilan ataupun pengetahuan tersebut yang apabila telah mampu dikuasai seluruhnya masyarakat kemudian bisa mencapai tahapan pendayaan. Dimana mereka diberikan kesempatan dan otoritas untuk menggunakan pengetahuan dan ke terampilan serta kemampuan yang telah dimiliki untuk kemudian digunakan dalam mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri sehingga bisa menjadi

masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tahap ketiga yaitu tahap pendayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan dan membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat kondisi seperti ini sering didudukan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah yang menjadi fasilitator. Masyarakat yang sudah mandiri tidak hanya dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara

dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.⁶²

Kegiatan yang dilakukan secara kolektif memang masih diyakini oleh sebagian pakar pengembangan masyarakat sebagai cara yang lebih efektif untuk mengembangkan taraf kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam banyak kasus pula ditemukan adanya kegagalan-kegagalan dari proyek-proyek yang seluruhnya dikerjakan secara berkelompok. Berdasar pada kenyataan-kenyataan yang sering ditemukan di lapangan maka terdapat 2 kalangan yang berbeda pendapat dalam hal pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Sebagian pakar berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan secara berkelompok akan lebih efisien dan lebih efektif, karena adanya efektivitas, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan secara individu akan lebih efisien dan efektif karena dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh⁶³.

Alasan yang sering ditemukan dari golongan yang tidak melakukan pendekatan kelompok adalah bahwa kalau kegiatan dilakukan secara berkelompok maka akan muncul perilaku yang saling mengharap dan menyebabkan ognum-ogum tertentu dalam kelompok itu bersikap masa bodoh. Sebaliknya adapula oknum yang justru menyalahgunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi nya. Jika kegiatan pengembangan dikerjakan secara individu maka individu-individu itu akan

⁶² Ambar Teguh Sulistiyani. *Op.Cit.*, h.84

⁶³ Ayub M. Padangaran, *Op Cit*, h. 32

melaksana kannya dengan penuh tanggung jawab sehingga tingkat keberhasilannya akan tinggi.

Adapun kalangan yang menyukai pendekatan kelompok diperoleh argumen bahwa kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau berkelompok akan lebih efisien dan lebih efektif karena mereka akan saling bersinergi baik dalam hal tenaga maupun pemikiran sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Untuk kedua pendapat ini, nampaknya masih harus dilakukan kaji tindak yang lebih banyak lagi untuk mendukung salah satunya.

3. Tujuan Pemberdayaan



Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut yang meliputi ke mandirian dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian pada masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dari kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif.

Kognitif yaitu perilaku dimana individu mecapai tingkat “tahu” pada objek yang diperkenalkan, kemampuan konatif yaitu perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melaku kan sesuatu tindakan terhadap objek, kemampuan afektif yaitu perilaku di mana individu mempunyai kecendrungan untuk suka atau tidak suka pada objek, kemampuan psikomotorik yaitu kemampuan bertindak setelah menerima

pengalaman belajar dengan aktivitas fisik berkaitan dengan keterampilan (*skill*)⁶⁴. Dengan demikian untuk dapat menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi, kognitif, afektif, konatif, psikomotorik, dan sumber daya lainnya bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembentukan kondisi masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif juga suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik yakni kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai

upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan juga pada keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan. Mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

⁶⁴ *Ibid.*, h.83

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut, maka dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan dan daya dari waktu ke waktu.⁶⁵ Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandiriannya.

Tujuan yang dimaksud penulis yakni pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi sosial ekonomi dimana pemberdayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan dan kemandirian mereka dengan upaya peningkatan kapasitas dan potensi-potensi yang mereka miliki diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik, menuju kepada masyarakat ideal. Melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu untuk ditambahkan kompetensi yakni, mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas, mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas, mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui, mampu bekerja sama rasional dalam bertindak mencapai tujuan⁶⁶. Kompetensi tersebut merupakan pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi terbaik dalam pembangunan sosial.

C. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan SDM

Pemberdayaan SDM yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada umumnya mengacu kepada peningkatan kesejahteraan sosial. Mengingat bahwa pekerja migrasi yang mengalami masalah pada perekonomian kehidupannya sehingga memunculkan

⁶⁵ *Ibid.*, h.84

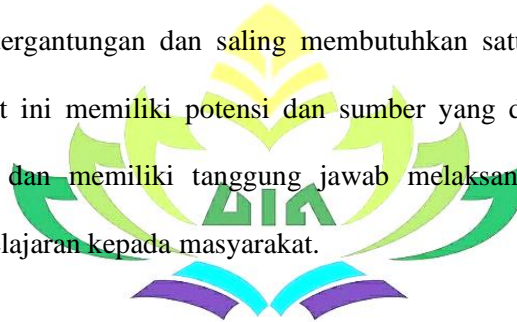
⁶⁶ Edi Suharto, *Op.Cit.*, h.82

masalah akan keberlangsungan hidupnya dengan tidak memiliki pekerjaan setelah kembali dari bekerja diluar negeri. Melihat dari masalah tersebut penanganan masalah pekerja migrasi dapat dilakukan dengan pemberian pengembangan kapasitas melalui pelatihan *lifeskill* kewirausahaan juga bantuan sarana dan prasarana yang diberikan untuk mempengaruhi serta merubah kehidupan sumber daya manusia menjadi lebih baik dengan kesejahteraan.

Perhatian pada faktor mutu entitas atau organisasi yang berupa kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi, struktur organisai, kompetensi, dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan atau efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat. Maka dapat dilihat penguatan kapasitas entitas pada kelembagaan yakni melakukan peningkatan kemampuan untuk memahami nilai lembaga dan melaksanakan tugas pembangunan secara berkelanjutan. Jadi, dalam melaksana kan tugas dan kegiatan lembaga perlu bidang tugas pendampingan sosial yang berorientasi pada proses yang akan dilaksanakan.

Pentingnya fungsi pada bidang tugas pendampingan sosial yang dilakukan berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi 4P, dalam pelaksanaan tersebut, pertama pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Tugas utama pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsinya merupakan kegiatan untuk memperkirakan tentang keadaan SDM pada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan lembaga, dalam pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan lembaga dan penentuan strategi, sarana serta prasarana, anggaran dan standar yang dibutuhkan. Adanya bantuan untuk memberikan akses baik karena tidak ada disekitar lingkunganya maupun yang sulit dijangkau untuk memberikan sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan dan disediakan agar pelaksnaan dapat berjalan efektif dan efisein.

Kedua, penguatan (*empowering*) berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas SDM masyarakat pekerja sosial berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Membangkitkan kesadaran masyarakat, dengan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. Penguatan ini diperlukan untuk menjalankan pelatihan kewirausahaan dengan pembelajaran sebagai proses saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Lembaga pemberdayaan masyarakat ini memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dan memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas untuk menyampaikan proses pembelajaran kepada masyarakat.



Ketiga, perlindungan (*protecting*) yakni berkaitan antara pendamping dengan lembaga eksternal atas nama dan kepentingan masyarakat dampingannya. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Yang menjadi dasar perlindungan dan hukum lembaga memiliki kedudukan legal yang sangat kuat, pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan berbagai Konvensi Internasional yang telah ditarifikasi oleh pemerintah. Termasuk perlindungan sosial untuk pemberdayaan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Nomor 04 tahun 2017 tentang Pemberdayaannya⁶⁷.

Keempat, pendukungan (*supporting*) fungsi yang mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada pekerja migrasi. Lembaga dapat melakukan Pendukungan (*Supporting*) dari pemberian pelatihan kewirausahaan pada SDM. Disamping itu, hal tersebut sebagai usaha untuk

⁶⁷ Buku Profil BP3TKI Lampung, (Lampung : BNP2TKI, 2018), h.7

meningkatkan kinerja mereka agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan meningkatkan pemberdayaan yang ada di lembaga sehingga sesuai dengan tugas, fungsinya masing-masing, pekerja sosial dalam melakukan pendampingan saat pelatihan. Fungsi tersebut dilakukan untuk kemudahan dan efektifitas maka pekerjaan tersebut di bagi sesuai dengan bagian keahlian dan kompetensi petugasnya dan mengoptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja lembaga pemberdayaan masyarakat.

Fungsi dan tugas lembaga pemberdayaan yang dilaksanakan pada bidang tugas pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi sebagai fasilitator yang memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan pengembangan kapasitas dapat terlaksana pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kehidupannya.

Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan berbagai aktifitasnya. Dalam tinjauannya yang lebih bersifat ekonomis, sumberdaya manusia dimaksudkan sebagai semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat. Sumber daya utama yang ada dan tersedia, yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat salah satunya potensi sumberdaya manusia (SDM)⁶⁸. Oleh karena itu disini diperlukan adanya langkah-langkah manajemen SDM guna menjamin bahwa tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menjalankan fungsi yang sesuai kebutuhan. Sumber daya manusia memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, karya, karsa).

⁶⁸ Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1983), hal.4

Perlunya melakukan pengembangan kapasitas atau penguatan kapasitas ini sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan serta penguatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang memahami dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang berupa pengetahuan dan keterampilan dengan pelatihan. Dari sudut fungsinya *operative institution* lembaga sosial yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.

Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, SDM tidak hanya dilihat peranannya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek non-ekonomi.⁶⁹ Jika dilihat dari sisi ekonomi yang sempit, sumberdaya manusia hanya semata-mata dilihat dan diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga diperlakukan sebagai objek (material). Padahal dalam perspektif perubahan faktor manusia merupakan faktor yang utama, sehingga sejatinya manusia merupakan subjek pembangunan. Kontribusi dan peranan yang dimainkannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas, tetapi juga kualitas baik sebagai objek maupun subjek pembangunan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan terdapat potensi SDM tidak semata-mata terletak pada kemungkinan sebagai potensi yang

⁶⁹Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal.188

dapat digerakkan proses pengembangan, melainkan terutama pada kedudukan sebagai pelaku pembangunan pengembangan masyarakat itu sendiri⁷⁰.

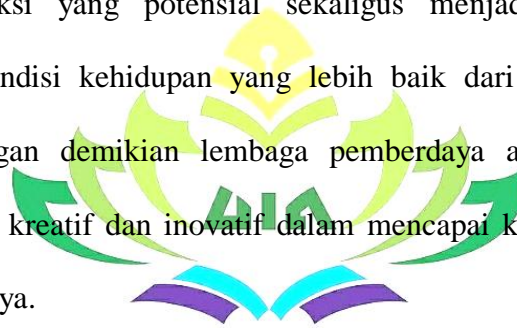
Menurut Faizal dan Mansur Hidayat dalam buku Sofyan Effendi, dalam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sumberdaya manusia tidak saja diperlakukan sebagai sumberdaya dalam perspektif ekonomi, tetapi juga dalam perspektif sosial-budaya. Dari sudut sosial budaya, sumberdaya manusia merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kapasitasnya untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang dan kesadaran akan interdependensi.⁷¹ Identifikasi dan fungsi (SDM) dalam kelompok masyarakat perlu memperhatikan aspek kuantitas, kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasi. Identifikasi SDM penting dilakukan, sehingga akan dapat di ketahui potensi yang dimiliki kelompok masyarakat. Demikian identifikasi dan pemetaan kualitas SDM tidak kalah pentingnya karena kemampuan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sangat dipengaruhi kualitas SDM yang dimiliki.

Fungsi lembaga dalam pemberdayaan SDM pada dasarnya menyangkut dua hal. Pertama, peningkatan dan pengembangan kualitas, kedua, pemanfaatan nya melalui berbagai peluang, aktifitas dan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup SDM. Peningkatan dan pengembangan dimaksud untuk menambah potensi dan kemampuan SDM tersebut, sehingga lebih mampu berperan

⁷⁰*Ibid.*, h.194

⁷¹Sofyan Effendi dkk, *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1996), hal.343

sebagai subjek dan objek pemberdayaan. Peluang dalam bentuk berbagai usaha dan aktifitas dimaksudkan untuk mengubah sumberdaya potensial menjadi aktual dan produktif. Kedua hal tersebut berjaln berkelindan membentuk fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pemberdayaan SDM yang produktif dan inovatif, yang menjadi faktor produksi yang potensial sekaligus menjadi faktor perubahan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik dari segala bidang serta memiliki kualitas dengan demikian lembaga pemberdaya an masyarakat dapat menjadikan SDM yang kreatif dan inovatif dalam mencapai kesejahteraan material dan spritual kehidupannya.



BAB III

GAMBARAN UMUM BP3TKI LAMPUNG DAN PEMBERDAYAANNYA TERHADAP (PMI) PURNA DI LAMPUNG

A. Gambaran Umum BP3TKI Lampung

1. Sejarah BNP2TKI dan BP3TKI

Sejarah penempatan Pekerja Migrasi Indonesia di luar negeri tercatat telah berlangsung sejak 1890 pada era kolonial Belanda. Selanjutnya, pada masa Indonesia meraih kemerdekaan tahun 1945 hingga akhir 1960-an, penempatan PMI keluar negeri belum melibatkan pemerintah, melainkan dilakukan secara perorangan, kekerabatan, dan bersifat tradisional. Penempatan PMI dengan berdasarkan kebijakan Pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 dibawah naungan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak saat itu pula penempatan PMI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (PPTKIS)⁷².

Selanjutnya pada tahun 1986, terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Seksi AKAN kemudian berubah menjadi Pusat AKAN dibawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans, dan pada tingkat daerah kegiatan penempatan PMI dilaksanakan oleh Balai AKAN. Perubahan kembali terjadi pada

^{72 72} Buku Profil BP3TKI Lampung, (Lampung : BNP2TKI, 2018), h. 10

1994, Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya digantikan dengan Direktorat Ekspor Jasa TKI di bawah Direktorat Jenderal Binapent. Namun hanya berselang lima tahun, tepatnya di tahun 1999, Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Perjalanan BNP2TKI dimulai pada saat dibentuknya Badan Koordinasi Penempatan TKI (BPTKI) pada tanggal 16 April 1999 melalui Keppres Nomor 29 Tahun 1999 dalam rangka meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI. Pada awal terbentuk, BPTKI memiliki keanggotaan yang terdiri dari 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI. Kemudian, pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Binapenta dan Direktorat PTKLN dibubarkan dan diganti menjadi Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Untuk memberikan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk Direktorat Sosialisasi dan Penempatan di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dijalankan oleh Balai Pelayanan dan Penempatan TKI (BP2TKI).

Pada tahun 2004 terbentuklah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang pada Pasal 94 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan (BNP2TKI), disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepolisian, Kementerian Sosial,

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Imigrasi (Kementerian Hukum dan Keamanan).

Berkaitan dengan struktur organisasi BNP2TKI maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala (Perka) BNP2TKI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI⁷³. Struktur organisasi BNP2TKI meliputi unsur-unsur instansi pemerintah tingkat pusat yang memiliki keterkaitan dalam pelayanan TKI. Pembentukan struktur organisasi tersebut juga diiringi dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 02 Tahun 2007 yang menunjuk Moh. Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan kehadiran BNP2TKI ini, maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Dan secara otomatis, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN dibubarkan serta fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.

Ditingkat daerah, kegiatan penempatan pekerja migrasi Indonesia dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), pada Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI) serta Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia⁷⁴. Saat ini UPT yang membantu tugas BNP2TKI dalam

⁷³ Buku Profil BP3TKI Lampung, (Lampung : BNP2TKI, 2018), h. 11

⁷⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi BNP2TKI <http://www.bnp2tki.go.id>, diakses pada 30 Januari 2019 pukul 19:50 WIB.

penempatan TKI ditingkat daerah terdiri dari BP3TKI sebanyak 20 Unit, LP3TKI sebanyak 4 Unit dan P4TKI sebanyak 23 Unit.

Perjalanan keberadaan BP3TKI memiliki sejarah tersendiri dimana sebelumnya bernama (AKAN) yakni Balai Antar Kerja Antar Negara merupakan salah satu unit pelaksana teknis Departemen Tenaga Kerja RI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 tahun 1984 kemudian berubah menjadi BNP2TKI yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep/137/ MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Setelah adanya BNP2TKI berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 81 tahun 2006 sesuai UU. No. 39 tahun 2004 pasal 94 dan 98 berubah menjadi BP3TKI ditetapkan dalam Surat Menteri Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/1943/1./M.PAN/8/2007, tentang perubahan Nomenklatur BP2TKI menjadi BP3TKI dan penyempurnaan tugas dan fungsi BP3TKI⁷⁵.

BNP2TKI melakukan pembukaan perwakilan di Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang. Pada saat itu Provinsi Lampung termasuk didalam wilayah BP3TKI Palembang. Wilayah kerja BP3TKI Palembang pada tahun 2009 sebagai Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI). P4TKI Lampung dipimpin oleh koordinator P4TKI yakni Bapak Muhtarom yang berlokasi di Jl. MS Batubara, Teluk Betung, Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2010 statusnya meningkat menjadi Loka Pelayanan Penempatan dan

⁷⁵ *Ibid.*, h. 5

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Lampung dan berpindah di Jl. Untung Suropati 21 A Kedaton Bandar Lampung. LP3TKI sempat berganti kepemimpinan dari Bapak Muhtarom ke Bapak Ahmad Salabi pada tahun 2013. Meninjau jumlah PMI yang semakin meningkat di wilayah Provinsi Lampung dan telah menjadikan Provinsi Lampung sebagai kantong PMI terbesar keempat di seluruh Indonesia, sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan serta untuk memperkuat peran dan kinerja dari BNP2TKI, LP3TKI, akhirnya berdiri sendiri (BP3TKI) Lampung pada Oktober tahun 2014 dipimpin oleh Ibu Sri Haryati SE,MM.

Seiring berkembangnya BP3TKI dibawah kepemimpinan Ibu Sri Haryati, BP3TKI Lampung semakin memperbaiki diri dan saat ini dalam proses menuju Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) setiap instansi pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migrasi yakni Kepolisian, Imigrasi, Sarana Kesehatan dan Asuransi akan berada dalam satu wilayah kerangka pelayanan. LTSP ini akan menjadi *one stop service* pelayanan publik sehingga tujuan BNP2TKI untuk memberikan pelayanan terbaik yakni cepat, murah, dan aman dapat terwujud.

2. Profil BP3TKI Lampung

BP3TKI di Provinsi Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dimana sebelumnya bernama Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang merupakan UPT dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BP3TKI dibentuk dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.333/KA/XII/2007 dimana terbentuknya setelah BNP2TKI berdiri

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI⁷⁶. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNP2TKI tersebut, BP3TKI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI dan sebagai UPT. BP3TKI adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNP2TKI.

UPT BP3TKI Lampung sebelumnya beroperasi sebagai Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang bergerak dibawah naungan BP3TKI Palembang di Tahun 2011, kemudian pada pertengahan tahun 2013 naik status menjadi Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI). Terakhir, pada bulan Oktober 2014 kembali naik status menjadi BP3TKI Lampung. BP3TKI Lampung memiliki wilayah kerja seluruh wilayah Provinsi Lampung dan memiliki kantor yang terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 21-A Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. BP3TKI Lampung sebagai kepanjangan tangan dari BNP2TKI bertugas untuk melayani para pekerja migrasi yang berada di wilayah kota/kabupaten bahkan desa yang sulit dijangkau. Keberadaan BP3TKI Lampung dapat membantu masyarakat yang ingin, sedang, dan telah bekerja secara legal serta terlindungi didalam negeri, tidak terlantar, tidak merasa miskin sengsara saat kembali dari Luar Negeri.

⁷⁶ Buku Profil BP3TKI Lampung, (Lampung : BNP2TKI, 2018), h. 4

3. Visi dan Misi BP3TKI

Adapun penjabaran dari visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi ialah sebagai berikut:

a. Visi

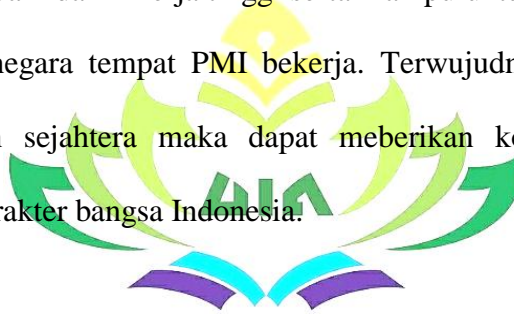
Visi yang menjadi nilai inti di sebuah organisasi yang menunjukkan keinginan, serta impian dan cita-cita yang akan diwujudkan sebagaimana rencana strategis ini BNP2TKI tahun 2015-2019 adalah untuk melaksanakan visi Presiden pada kabinet kerja tahun 2015-2019 yaitu⁷⁷: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan pada gotong royong”. Selaras dengan visi tersebut dalam rencana strategis BNP2TKI terkandung maksud bahwa visi yang diemban BNP2TKI adalah CPMI/PMI terlindungi didalam negeri, PMI tidak terlantar di luar negeri, PMI tidak miskin sengsara saat kembali dari luar negeri. Maka BNP2TKI memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya PMI yang Profesional, Bermartabat, dan Sejahtera” dalam hal ini dimaksud dengan Profesional yakni bahwa PMI yang bekerja diluar negeri memiliki kompetensi dan melaksanakan pekerjaan/job dengan disiplin ilmu yang tinggi. Bermartabat yakni bahwa PMI yang memiliki kompetensi daya saing gaji memahami dan mendapat perlindungan hukum dan menjadikan dirinya bermartabat sebagai pekerja migrasi Indonesia di luar negeri, Sejahtera yakni bahwa PMI dan keluarganya tidak hanya memperoleh gaji atau pendapatan yang layak sesuai keahliannya namun juga dapat mensejahterakan dirinya, keluarga dan bangsa.

Visi tersebut juga terkandung makna bahwa profil PMI ideal yang ingin diwujudkan adalah PMI yang secara ideologis memiliki komitmen terhadap

⁷⁷ *Ibid.*, h. 11

nilai-nilai Pancasila, PMI yang secara sosial, politik, dan budaya memiliki karakter pendukung bagi pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga mertabat bangsa melalui PMI sebagai warga negara Inodnesia (WNI) atau “duta” WNI di luar negeri, yang ditujukan dalam bentuk perilaku baik dan kinerja tinggi serta mampu untuk menjaga hubungan politik dengan negara tempat PMI bekerja. Terwujudnya PMI profesional, bermartabat dan sejahtera maka dapat meberikan kontribusi besar bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia.



b. Misi

Misi ini bermuatkan pada tahapan-tahapan untuk mewujudkan dan merangsang visi utama yang bersifat lebih detail sebagaimana yang telah ditetapkan maka adapun MISI Kabinet kerja tahun 2015-2019 terkait dengan pelaksanaan kegiatan BNP2TKI yakni “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera” serta dapat “Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing”. Selaras dengan ini misi Presiden dalam Rencana strategis BNP2TKI terkandung maksud dari misi yang diemban BNP2TKI adalah:

- 1) Zero PMI Informal yakni seluruh PMI yang dikirimkan ke luar negeri berstatus tercatat sebagai PMI dan dipekerjakan pada sektor formal dan target juga mencakup beralihnya seluruh PMI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi PMI legal pada sektor formal.
- 2) Pra Keberangkatan PMI rata-rata 1 bulan yakni tesedianya layanan cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi pembekalan persiapan keberangkatan hingga keberangkatan PMI menuju negara penempatan, dua bulan gaji biaya maksimal PMI yakni meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi

beban PMI sehingga menjadi besarnya 2 bulan gaji PMI yang bersangkutan.

- 3) Remitansi PMI meningkat 3 kali lipat yakni meningkatkan nilai pengiriman uang PMI dari negara penempatan menjadi 3x lipat dari nilai saat ini dari tahun 2014 sebesar Rp. 70 triliun/tahun.
- 4) Perlindungan utuh di 4 tahapan yakni mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak ditahap pra-keberangkatan pada masa kerja dan masa kepulangan hingga pada tahap dilakukannya pemberdayaan.
- 5) PMI purna jalani 5 solusi mandiri yakni PMI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa pelatihan serta dukungan finansial dan pendampingan usaha untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri dengan pelatihan dan lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan.⁷⁸

4. Tujuan dan Sasaran Strategis BP3TKI

a. Tujuan

Tujuan ini sebagai gagasan atau hasil yang diinginkan dengan apa yang sudah direncanakan dan berkomitmen untuk mencapainya pada pelaksanaan dalam hal ini sebagaimana rencana strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 yakni:

- 1) Terwujudnya PMI yang profesional, bermartabat, dan sejahtera.
- 2) Mengarusutamakan tata kelola pemerintahan yang baik.⁷⁹

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah suatu outcome yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh BNP2TKI dalam jangka waktu lima tahun.

⁷⁸ *Ibid.*, h.13

⁷⁹ *Ibid.*, h. 14

Adapun sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 :

- 1) Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan PMI.
- 2) Meningkatkan penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI.
- 3) Meningkatkan perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan.
- 4) Meningkatnya CPMI/PMI Purna yang berwirausaha.
- 5) Pelayanan terpadu, profesional, dan bertanggung jawab serta pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 6) Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI.
- 7) Meningkatkan Kompetisi, Integritas APiP dan Penyelenggaraan SPIP⁸⁰.

5. Tugas Pokok dan Fungsi BP3TKI

a. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada lembaga atau organisasi untuk dicapai dan dilakukan, jadi Tupoksi menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Tugas pokok ini menggambarkan ruang lingkup kompleksitas. Fungsi disini perwujudan tugas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai lembaga menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit lembaga menjadi landasan hukum untuk lembaga dalam beraktivitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugasnya dan koordinasi. Berdasarkan Peraturan

⁸⁰ *Ibid.*,h. 15

Kepala BNP2TKI Nomor: PER.03/KA/I/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Tugas BP3TKI Bandar Lampung yakni memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja, melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok dilaksanakan sesuai diatur pada Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.20/KA/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 tentang perubahan atas Nomor : PER.35/KA/ VIII/2007 Tanggal 13 Agustus 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan yang meliputi yakni⁸¹:

- 1) Seksi kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan, pemasyarakatan program, pembinaan sistem dan jaringan pengelolaan informasi, pemantauan kerjasama luar negeri dan promosi, monitoring penyediaan CPMI, serta fasilitasi peningkatan kinerja pengantar kerja. Sasaran kerja seksi kelembagaan dan pemasyarakatan program adalah tersedia peta potensi CPMI, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan PMI non prosuderal, meningkatkan kepatuhan lembaga pada penempatan dan mendukung terhadap standar ketentuan berlaku.

⁸¹ *Ibid.*,h.19

- 2) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia serta pendaftaran dan seleksi penempatan Calon Pekerja Migrasi Indonesia oleh pemerintah, pembekalan akhir keberangkatan serta pengharmonisan peningkatan kualitas Pekerja Migrasi Indonesia. Sasaran kerja seksi kelembagaan dan pemasyarakatan program adalah meningkatkan penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis P2TKI, meningkatkan pelayanan PMI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi non tunai.
- 3) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan Pekerja Migrasi Purna, pemantauan keberangkatan dan pelayanan pemulangan, fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan serta monitoring. Sasaran kerja seksi kelembagaan dan pemasyarakatan program adalah pengaduan masalah Pekerja Migrasi Indonesia dilayani, diproses dan diselesaikan, penguatan advokasi dan mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak pra masa dan purna PMI, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan, meningkatkan kemampuan PMI purna mengelola keuangan termasuk mengembangkan usaha mikro, fasilitasi penangan Pekerja Migrasi Indonesia bermasalah.
- 4) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. Sasaran kerja seksi kelembagaan dan pemasyarakatan program adalah dengan meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan anggaran pelayanan administrasi kerjasama serta hasil melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan. Demi terwujudnya kepegawaian yang tepat fungsi.

b. Melaksanakan tugas disini merupakan wujud pertanggung jawaban dari organisasi atau lembaga berdasarkan perintah pelaksanaan yang sudah diberikan karena kewajiban serta yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan dari lembaga ini. Tugas pokok dan fungsi BP3TKI harus di operasionalkan dengan semaksimal mungkin agar berjalan dengan *sustainabel* juga memperbaiki tugas dan fungsi yang kurang berjalan baik.

fungsi sebagaimana dijelaskan BP3TKI Bandar Lampung dengan tegas untuk menyelenggarakan sebagai berikut ini yakni⁸²:

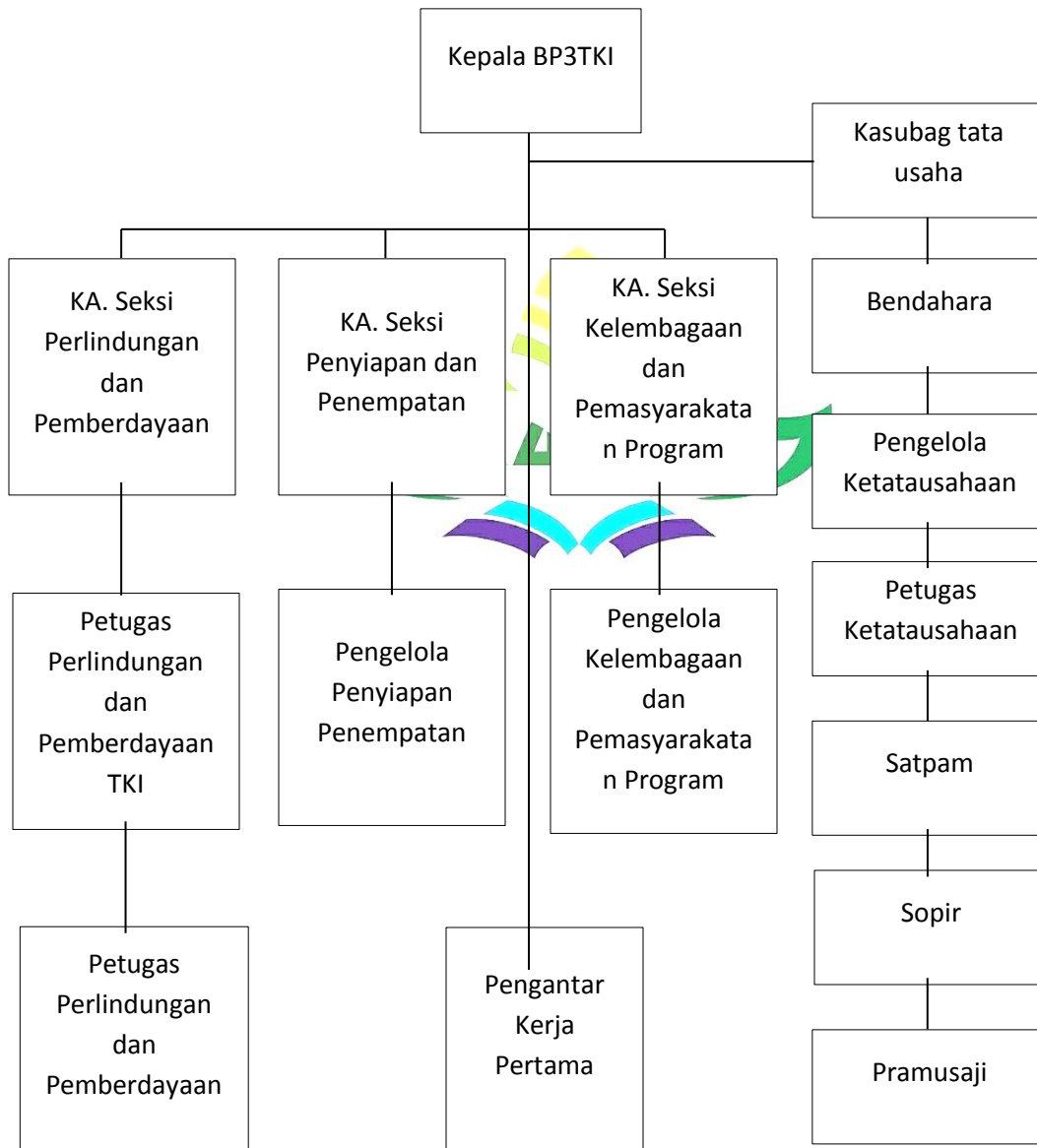
- 1) Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran.
- 2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan pekerja migrasi Indonesia.
- 3) Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan PMI.
- 4) Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- 5) Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI.
- 6) Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan
- 7) Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan.
- 8) Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI penempatan oleh pemerintah.
- 9) Monitoring penyediaan, pelaksanaan sertifikasi calon PMI. Pemantauan kerjasama luar negeri dan promosi.
- 10) Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah PMI.
- 11) Fasilitasi unit pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI.
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

6. Struktur Organisasi BP3TKI Lampung

- a. Struktur Kepengurusan BP3TKI Lampung Berikut merupakan struktur kepengurusan tahun 2018:

⁸² *Ibid.*, h.18

Bagan 3.1. Struktur Organisasi BP3TKI Lampung



Sumber Profil BP3TKI Lampung

B. Tahapan Pemberdayaan Lembaga BP3TKI terhadap PMI Purna di Lampung Timur

Fungsi yang dilakukan oleh BP3TKI dalam pemberdayaan PMI melalui pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian kehidupan PMI Purna, dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya BP3TKI melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi. Fungsi tersebut akan berjalan lancar dengan melaksanakan tugas dan kegiatan lembaga BP3TKI pada bidang tugas pendampingan sosial adapun yang berorientasi pada proses yang akan dilaksanakan. Pentingnya pemberdayaan ini untuk PMI Purna yakni untuk memperbaiki perekonomian kehidupannya sehari-harinya agar menjadi lebih baik setelah kepulangan dari luar negeri.

Tujuan Pemberdayaan BP3TKI adalah membentuk PMI Purna menjadi mandiri. Berupa kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan. Kemandirian ini ditandai kemampuan untuk memikirkan, dengan mencapai tingkat tahu pada yang diperkenalkan, melakukan sesuatu tindakan, perilaku untuk suka atau tidak suka, kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar dengan aktivitas fisik berkaitan dengan (*skill*).

Tujuan Pemberdayaan BP3TKI ini untuk memberikan motivasi, membuka wawasan, dan memberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi produktif melalui kegiatan wirausaha, investasi, dan usaha-usaha produktif lainnya dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja diluar negeri serta memanfaatkan potensi diri sendiri maupun lingkungan sekitar seperti sumber daya

alam. Dapat meningkatkan perekonomian keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat sekitar bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Serta memulihkan trauma yang dihadapi oleh PMI purna yang mengalami permasalahan psikis sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri serta dapat kembali ke masyarakat untuk melakukan aktivitas sebagai mana mestinya⁸³.

Membuka usaha sebagai contoh yang telah dipaparkan di atas oleh penulis dan penjelasan dari Program BP3TKI mengenai pelatihan kewirausahaan pembuatan bolu, roti dan kue jajanan pasar pelaksanaan pelatihan selama 6 hari pada tanggal 8-13 Oktober 2018 yang dilaksanakan di kantor kelurahan Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur⁸⁴.

Fungsi yang merupakan tugas yang dilaksanakan oleh BP3TKI ini adalah pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi dengan pengembangan kapasitas dan pemberian akses yang diberikan untuk PMI Purna dan keluarganya berupa pemberian motivasi dan kesempatan bagi PMI Purna untuk memperbaiki hidupnya. BP3TKI terpanggil untuk mampu memobilisasi yang artinya melakukan tindakan berupa penggerakan dan penggunaan sumber daya nasional sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan dengan komponen kekuatan yang digunakan secara tepat dan terarah, dan mengkoordinasi sumber-sumber agar dapat dijangkau oleh PMI Purna. Dengan demikian tugas BP3TKI menghubungkan dan membantu para PMI Purna dan

⁸³ Waydinsyah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI, *Wawancara*, kantor BP3TKI Tanggal 01 Oktober 2018

⁸⁴ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 08 Oktober 2018

keluarganya dengan sumber-sumber tersebut dengan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri maupun kapasitas dan kualitas hidup PMI Purna serta pemecahan masalahnya.

BP3TKI menjamin adanya bantuan untuk memberikan akses terhadap sumber-sumber baik karena tidak ada disekitar lingkungannya maupun yang sulit dijangkau untuk memberikan sarana dan prasarana yang dipersiapkan, disediakan dengan baik agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan yang dicapai yakni pemberdayaan PMI Purna yang dilaksanakan dalam pelatihan ke wirausahaan. Dengan menggunakan tahap-tahap pemberdayaan sebagaimana yang menjadi landasan teori dalam melaksanakan penelitian. Beberapa tahapan tersebut diantaranya tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

1. Tahap-Tahap dalam Pemberdayaan PMI

a. Tahap Penyadaran

Tahap Penyadaran di dalam tahapan ini petugas seksi perlindungan dan pemberdayaan berperan sebagai pendamping atau fasilitator mengadakan wawancara atau indentifikasi calon peserta PMI dengan mencari lokasi terlebih dahulu yang terdapat banyak jumlah kantong PMI. Selanjutnya setelah didapatkan lokasi pemberdayaan BP3TKI dibantu oleh Kepala Desa dan CO-KKBM (Community Organizer Komunitas Keluarga Buruh Migran) untuk menyebar luaskan informasi

kebawah dan dibantu untuk mencari peserta yang berminat yang ada di setiap daerah dan lokasi ditemukannya titik kantong PMI yakni Lampung Timur.⁸⁵

Penyadaran ini dilakukan dengan tahapan kesadaran, keinginan, evaluasi. Pertama tahap kesadaran (*awareness*) pada tahap ini pekerja migrasi Indonesia purna sebelum diadakannya pelatihan mereka dikumpulkan di Balai Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 09.00 diberikan sosialisasi dan arahan untuk ikut serta pelatihan kewirausahaan dan diberikan juga pembekalan dengan pemberian motivasi, dan membuka wawasan pengetahuan, dan dapat memunculkan minat PMI untuk dapat mengelola penghasilan yang didapat dengan usaha mandiri karena pemberdayaan pada PMI ini merupakan program wajib dari Pemerintah yang harus dijalankan⁸⁶.

Penyadaran ini merupakan tahap awal yang mempunyai arti bahwa dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran dalam diri untuk berubah apabila tidak ada kesadaran untuk berubah. Untuk mengadakan suatu perubahan perlu ada langkah yang di tempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan dapat tercapai.

Tahapan selanjutnya setelah PMI Purna sadar akan usaha yang bisa dilakukan untuk perubahan kehidupannya, tahap kedua *interest* (keinginan) dalam mengadakan perubahan harus timbul perasaan minat terhadap perubahan yang dikenal. Timbul minat berupa keinginan dari dalam hati yang dapat mendorong, menguatkan

⁸⁵ Dani Rismala, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, Tanggal 01 Oktober 2018

⁸⁶ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur tanggal 01 Oktober 2018

kesadaran diri untuk berubah dengan pelatihan kewirausahaan yang ditawarkan PMI Purna bisa mendiskusikan dengan BP3TKI dan menyampaikan minat usaha yang mereka inginkan.

Hasil dari kegiatan ini akan memperkirakan tentang keadaan dari pekerja migrasi agar sesuai dengan kebutuhan, menetapkan prosedur terbaik, yakni BP3TKI bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan. Setelah adanya keinginan dan minat PMI Purna dilakukan dengan adanya perencanaan yang sudah dipersiapkan dengan baik serta matang sesuai tujuan yang dicapai yakni pemberdayaan PMI Purna yang di laksanakan dalam pelatihan kewirausahaan.

Perencanaan pemberdayaan yang dilakukan BP3TKI melakukan identifikasi jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan kearifan lokal. Apabila peserta berminat pada pelatihan tenaga kerja produktif, maka harus dipastikan adanya mitra atau *stakeholder* terkait yang mempersiapkan peluang kerja dalam negeri sesuai dengan minat dan potensi peserta. Adapun bila minat peserta adalah menjadi wirausaha maka harus dipastikan adanya akses pasar dan modal dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga dan *stakeholder* terkait. Lokasi pelatihan harus mudah dijangkau peserta dan ruangan pelatihan harus di lengkapi dengan sarana, prasarana yang memadai untuk kelancaraan proses pelaksanaan. Untuk jenis pelatihan yang diminati dan akan di lakukan di Kabupaten Lampung Timur yakni pembuatan roti, kue bolu, dan jajanan pasar.⁸⁷

⁸⁷ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 01 Oktober 2018

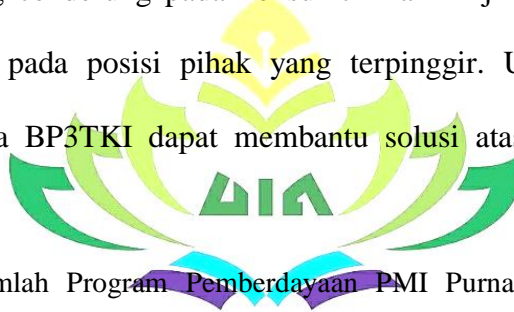
Tahapan ketiga *evaluasi* (evaluasi) tahap ini akan terjadi penilaian terhadap suatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan. Evaluasi ini dapat memudahkan tujuan dan langkah dalam melakukan perubahan. Pada tahap ini juga sebagai penentu dari penyadaran bagi PMI Purna dan keluarganya untuk mengikuti pelatihan sebagai peserta atau tidak. Jadi, evaluasi dari penyadaran ini bertujuan untuk mencoba menggerakkan PMI Purna agar mau bekerja dengan sendirinya dan penuh kesadaran secara bersama-sama untuk membentuk kelompok usaha ini dibutuhkan ke pimpinan (*leadership*) yang baik. Tahap ini merupakan upaya dan penilaian untuk merealisasikan pada pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan.

Setelah tahap evaluasi terlaksana akan dipilih peserta dengan syarat tertentu yakni pulang dari luar negeri maksimal 5 tahun dan keluarganya, keluarga dan PMI masih bekerja diluar negeri, memiliki minat untuk berwirausaha isi format surat pernyataan keikutsertaan dengan program pemberdayaan, fotocopy paspor/surat perjalanan laksana paspor atau surat keterangan kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa peserta adalah PMI Purna termasuk keluarganya, mendapatkan izin dari suami/istri/ orang tua/anak, dilarang membawa anak pada saat pelatihan, hanya diikuti satu anggota keluarga dan jumlah peserta 25 orang/kelas.⁸⁸

Program Pemberdayaan BP3TKI ini memberikan pengetahuan terkait pengembangan ekonomi produktif (wirausaha, investasi, dan usaha-usaha produktif lainnya) menggunakan serta memanfaatkan penghasilan yang

⁸⁸ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 01 Oktober 2018

diperoleh selama diluar negeri, potensi diri, maupun lingkungan sekitar seperti sumber daya alam dan lain-lain. Di BP3TKI inilah PMI mendapatkan bantuan serta perhatian penanganan dan dapat berkonsultasi tentang masalah yang dialami PMI Purna sesudah dan sebelum keberangkatvan. Kehidupan PMI Purna yang cenderung pada konsumtif hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada posisi pihak yang terpinggir. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP3TKI dapat membantu solusi atas perilaku para PMI Purna tersebut.



Adapun jumlah Program Pemberdayaan PMI Purna yang dilakukan oleh BP3TKI sebanyak 30 Paket yang terlaksana dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 dan tersebar diseluruh Kabupaten di Provinsi Lampung yang terdapat banyak kantong-kantong PMI Purna. Jumlah peserta dan sektor pelatihan pemberdayaan kewirausahaan ini yang sudah di laksanakan tahun 2018 tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Program Pemberdayaan PMI Purna Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung Tahun 2018

NO	TANGGAL PELATIHAN	PESERTA	SEKTOR PELATIHAN
1	19-24 Maret	25 orang	Kuliner
2	19-24 Maret	25 orang	Ketahanan Pangan
3	19-24 Maret	25 orang	Ketahanan Pangan
4	23 - 28 April	25 orang	Kuliner
5	30 April-5 Mei	25 orang	Ekonomi Kreatif
6	7 - 12 Mei	25 orang	Ekonomi Kreatif
7	30 - 4 Agustus	25 orang	Kuliner
8	30-4 Agustus	25 orang	KetahananPangan

9	3-8 September	25 orang	Kuliner
10	8-13 Oktober	25 orang	Kuliner
11	8-13 Oktober	25 orang	Kuliner
JUMLAH PESERTA			275 ORANG

SUMBER : BP3TKI LAMPUNG 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas jelas bahwa secara keseluruhan jumlah PMI Purna yang mengikuti Program pemberdayaan dari BP3TKI pada tahun 2018 berjumlah 275 orang. Maka banyak PMI Purna dan keluarganya yang sadar akan pentingnya mengikuti pelatihan kewirausahaan ini yang menjadi solusi serta peluang untuk memiliki pekerjaan.

Adapun Program Kerja BP3TKI tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Program Kerja BP3TKI Lampung Tahun 2018

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI PELATIHAN	BIDANG PELATIHAN
1	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Donomulyo, Kec. Bumagung, Lampung Timur	Pembuatan Makanan Olahan Singkong (Eyek-eyek dan Klanting)
2	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Mulyoasri, Kec. Bumagung, Lampung Timur	Budidaya Ikan Lele
3	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Tanjung Inten, Kec. Purbolinggo, Lampung Timur	Budidaya Ayam KUB
4	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Tanjung Jaya, Kec. Bangunrejo, Lampung Tengah	Pembuatan Makanan Olahan Jagung
5	Pemberdayaan Terintegrasi	Aula Koramil, Kec. Kedondong, Pesawaran	Kreasi Souvenir Ornamen Tapis
6	Pemberdayaan Terintegrasi	Aula Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan, Metro	Kreasi Souvenir Rajut (Crochet)

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI PELATIHAN	BIDANG PELATIHAN
7	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur	Pembuatan Makanan Olahan Jagung
8	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur	Budidaya Jamur Tiram
9	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Purbosembodo, Metrokibang, Lampung Timur	Pembuatan Makanan Olahan Singkong
10	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Teluk Dalem, Matarm Baru, Lampung Timur	Pembuatan Bolu, Roti, dan Jajanan Pasar
11	Pemberdayaan Terintegrasi	Balai Desa Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu, Lampung Timur	Pembuatan Bolu, Roti, dan Jajanan Pasar

Sumber : BP3TKI LAMPUNG 2018

Berdasarkan matriks di atas menunjukkan upaya BP3TKI sebagai fasilitator pemberdayaan dalam menyadarkan PMI melalui sosialisasi yang dilakukan untuk mengajak dan untuk menyadarkan PMI akan potensi diri yang dimiliki oleh setiap PMI. Dengan demikian respon yang didapatkan dari PMI semua mau ikut serta dengan semangat dan antusias dalam mengikuti program kegiatan pelatihan. Yang kemudian dengan berjalan nya waktu secara bertahap PMI bisa mengajak masyarakat lainnya untuk ikut berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja.

Sebelum membuka usaha dari program pelatihan para PMI Purna yang ada di Lampung Timur tidak memiliki pekerjaan dan berdiam diri saja dirumah. Penghasilan yang mereka peroleh itu, biasanya habis terpakai untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan untuk biaya pendidikan anak, dan cenderung konsumtif dengan berbagai kebutuhan lainnya. Demikian dapat dikatakan taraf kehidupan mereka hanya habis untuk sesaat saja tanpa ada pemanfaatan

mempertahankan dan ke berlanjutan kelangsungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat Penuturan yang dikatakan oleh Ibu Lis.

“Penghasilan atau gaji yang saya dapatkan selama bekerja diluar negeri di Taiwan selama 8 tahun sebagai PRT sangat besar untuk saya dan satu bulan saya bisa mendapatkan 8 juta pada tahun 2012, dari hasil banting tulang saya bekerja disana anak saya bisa sekolah dan kebutuhan bisa terpenuhi saya bisa beli kebun. Dan pekerjaan saya sekarang setelah pulang dari luar negeri hanya pengampas makanan ringan dengan dagang keliling. Minat saya ikut pelatihan disini menambah ilmu dan wawasan saya pingin belajar dari sini agar kedepannya lebih bagus, dari saya bekerja diluar negeri belum ada usaha atau pekerjaan yang akan saya lakukan kedepannya, dari pelatihan ini insyallah saya akan buka usaha roti. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ilmu-ilmu yang sangat mahal yang tidak bisa didapatkan diluar sana. Manfaat yang saya dapatkan sangat banyak. Harapan saya dari pelatihan ini dapat mengembangkan usaha dengan PMI lainnya, kami semangat men jalankannya”⁸⁹.

Kehadiran BP3TKI pada Program pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya dengan usaha pembuatan kue dapat dijadikan sebagai potensi yang mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat. Disadari oleh PMI Purna bahwasanya potensi yang dimiliki ada pada diri sendiri mampu memberikan nilai sumbangsih ekonomi jika dikelola, dilaksanakan dengan baik dengan minat kesadaran akan perubahan dengan kehidupan nya. Kesadaran dari salah seorang PMI Purna yang menjadi penggerak CO-KKBM (Community Organizer Komintas Keluarga Buruh Migran) warga Lampung Timur bernama Ibu Dewi sekaligus menjadi pelopor PMI Purna yang berhasil dalam usaha jamur, membantu mencari dan menyadar kan PMI Purna lainnya agar membuka usaha mandiri seperti dirinya.

“dulu saya sebelum seperti sekarang ini saya adalah PMI Purna yang pulang tanpa kesuksesan atau hasil yang bisa saya jadikan mata pencaharian kehidupan selanjutnya, saya hanya mengurung diri dirumah tidak ada kegiatan yang saya

⁸⁹Liswati 45 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung, *Wawancara*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 13 Oktober 2018

lakukan untuk waktu yang lama. Awalnya saya ragu untuk mengikutinya tetapi BP3TKI meyakinkan dan menyadarkan saya untuk dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dengan minat yang diinginkan serta usaha saya untuk bisa menjalankan apa yang sudah mereka ajarkan. Dan sekarang saya merasakan ketika kita berani mencoba untuk merubah hidup dengan segala tantangan saya akan berhasil dan akhirnya saya membangun usaha jamur tiram dan olahan berbagai macam dari jamur dan alhamdulillah usaha saya berkembang hingga dikirim keluar Jawa. Semua ini saya kembangkan dari hasil pelatihan yang saya dapatkan, saya merasakan sekali banyak manfaat yang bisa saya rasakan dari program pemberdayaan PMI ini saya membantu BP3TKI untuk mengajak dan merangkul para PMI Purna lainnya untuk ikut serta

dalam merubah hidupnya agar ke hidupnya jadi sejahtera.”⁹⁰

Berawal dari situ, keberhasilan dari PMI Purna dapat dilihat dari CO-KKBM yang sudah memiliki usaha mandiri yang dapat dijadikan acuan semangat untuk para PMI Purna lainnya untuk dapat berani melakukan perubahan dengan membuka usaha yang dapat dikembangkan dirinya. Selanjutnya melanjutkan usahanya agar dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat luas dan akan mampu membuka peluang ekonomi.

Rasa simpatinya serta peduli tinggi terhadap sesama PMI Purna yang sangat jauh dari kesejahteraan ekonominya hal tersebut dikarenakan banyak PMI Purna yang kurang ilmu pengetahuan dan wawasan. Berangkat dari tekad dan usaha untuk membantu menggali potensi SDM yang ada di setiap PMI Purna pada akhirnya membuahkan hasil, upayanya itu berhasil membuat mereka mulai menyadari potensinya untuk berkembang memperbaiki perekonomian keluarga hal tersebut dilihat dari kemauan serta minat mereka untuk berwirausaha.

⁹⁰Dewi 40 tahun, CO-KKBM (Community Organizing Komunitas Keluarga Buruh Migran) Pekerja Migrasi Purna dari Lampung Timur, Wawancara Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 13 Oktober 2018

Materi pelatihan yang akan disampaikan adalah wawasan dan teori seputar pelatihan dari awal tentang motivasi training dan insprator, perencanaan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan usaha seperti (prinsip-prinsip kewirausahaan, bagaimana membangun usaha produk, harga, tempat, pengemasan, pemasaran dan pengorganisasian SDM), praktek magang, rencana aksi. Pasca Pelatihan melaksanakan Monitoring yang dilakukan BP3TKI Lampung, Pameran Produk PMI Purna, Sosialisasi KUR PMI Wirausaha. BP3TKI Lampung juga memberikan bantuan mengenai usaha yang dibentuk PMI Purna menjadi wirausaha yang mandiri, membantu mencari jalan keluar ketika PMI Purna ada hambatan pada usahanya dicarikan solusi berupa bantuan dana atau bantuan alat⁹¹.

Menunjukkan upaya penyadaran dengan memberikan pencerahan yang dilakukan BP3TKI adalah melalui tahap kesadaran (*awerness*) selanjutnya tahan keinginan (*interest*) dan tahap akhir evaluasi hasil dari penyadaran yang dilakukan didapatkanlah PMI Purna yang akan menjadi peserta pelatihan kewirausaan. Setelah didapatkan peserta PMI Purna dari tahap penyadaran akan ada tahap pengkapasitasan selanjutnya dengan pelaksanaan pelatihan dari BP3TKI kegiatan tersebut dilakukan pada bulan 8-13 Oktober 2018 dilakukan selama 6 hari. Lokasi dikantor kelurahan desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur yang berperan sebagai fasilitator pemberdayaan BP3TKI dan stake holder serta narasumber yang terkait pada program pelatihan kewirausahaan.

⁹¹ Praja Setiawati, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, Tanggal 11 Oktober 2018

b. Tahap Pengkapasitasan

Tahapan pengkapasitasan pada tahap ini yaitu pengkapasitasan manusia. Pengkapasitasan manusia yang dilakukan dengan memberikan keterampilan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan pelatihan oleh BP3TKI dan *stakeholder* terkait sebagai Fasilitator

pemberdayaan PMI Purna desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur.



Tugas Staff BP3TKI untuk melaksanakan kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Perencanaan pemberdayaan yang dilakukan BP3TKI melakukan identifikasi jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan kearifan lokal.

“Apabila peserta berminat pada pelatihan tenaga kerja produktif, maka harus dipastikan adanya mitra atau *stakeholder* terkait yang mempersiapkan an peluang kerja dalam negeri sesuai dengan minat dan potensi peserta. Program pemberdayaan PMI, PMI Purna dan keluarga ada 2 jenis pelatihan yakni wirausaha mandiri, yang dilakukan untuk PMI purna adapun program wirausaha ada 4 program seperti ketahanan pangan contoh peternakan, perikanan, perkebunan, industri ekonomi kreatif contoh kerajinan dan industri kreatif, industri pariwisata contoh kuliner, travel guide dan industri jasa contoh las, menjahit, service elektronik, bengkel, salon. Pekerja migrasi Produktif yakni ditunjukkan untuk PMI Purna dan keluarganya yang mempunyai minat bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk jenis pelatihan yang dilakukan di daerah Lampung Timur yakni pembuatan roti, kue bolu, dan jajanan pasar”.⁹²

⁹² *Ibid.*,

Pelatihan yang dilaksanakan oleh BP3TKI ini yang terdiri dari teori dan praktek pelatihan kewirausahaan pembuatan roti, kue bolu, dan jajanan pasar, dengan melibatkan mitra serta stakeholder terkait. Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan terdiri dari teori dan praktek selama 6 hari, 60 menit perjam pelajaran dengan melibatkan beberapa narasumber dari mitra atau *stakeholder* terkait. Adapun materi pelatihan ini terdiri dari, program pemberdayaan masyarakat, motivasi pelatihan dan inspirasi, pengelolaan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan usaha dan prinsip kewirausahaan (*entrepreneurship*), praktek atau magang, rencana aksi atau materi dapat disesuaikan dengan standar pelatihan dari mitra/stakeholder terkait sesuai perusahaannya (khusus Tenaga Kerja Produktif).

Sebagai bentuk komitmen bersama atas pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya perlu dilakukan penandatanganan pada kesepakatan bersama antara kelompok PMI yang ikut pelatihan, Mitra Industri, dan Lembaga Keuangan yang terlibat dapat kegiatan pemberdayaan. Hanya boleh diikuti oleh 1 anggota keluarga dan jumlah peserta maksimal 25 orang/kelas. Dari 25 orang peserta dibagi 5 orang setiap kelompok dengan 1 orang yang menjadi ketua kelompok.⁹³

Setelah program pemberdayaan PMI Purna dan keluarga nya dilaksanakan, BP3TKI mengumpulkan komponen output (keluaran), atas kegiatan tersebut. BP3TKI melakukan strategi pencapaian outcomes (hasil) melalui fasilitasi (pendampingan) bersama mitra atau *stakeholder* terkait. Pembinaan pemberdayaan PMI dan keluarganya dilakukan bersama BNP2TKI/ BP3TKI /LP3TKI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

⁹³ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 08 Oktober 2018

Pembinaan pemberdayaan PMI, PMI Purna dan Keluarganya dapat berupa fasilitasi pendampingan, pemberian pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses modal, akses sarana dan atau prasarana, akses terhadap pasar dan lain-lain. Pembiayaan anggaran kegiatan Pemberdayaan an PMI, PMI Purna dan Keluarganya dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI atau LP3TKI. Tahap awal yang dilakukan yakni Pelaksanaan program Pemberdayaan, Pembinaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan akan dilakukan pada waktu setelah 3 bulan dilakukan pelatihan kewirausahaan untuk melihat dan mengawasi jalannya program dengan kemandirian para PMI Purna⁹⁴.

Pelatihan kewirausahaan tersebut diadakan setelah melihat banyak PMI Purna yang tertarik dan berminat untuk ikut sebagai peserta pelatihan untuk usaha pembuatan bolu, roti, dan kue jajanan pasar. Upaya BP3TKI untuk mengajak PMI Purna dalam membuka usaha membuahkan hasil dan tanpa disadari juga telah mempengaruhi PMI Purna lainnya untuk ikut sebagai peserta pelatihan kewirausahaan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Isma wati saat diwawancarai.


“...untuk saya pelatihan pemberdayaan kewirausahaan dari BP3TKI ini sangat diperlukan agar PMI Purna dapat mengetahui tentang pemberdayaan kewirausahaan dan mengenai pelatihan dan dapat berlanjut untuk PMI Purna yang lainnya sangat perlu ikut serta dan kami sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini kami dibagi 1 kelompok ada 5 orang, kami sangat antusias mengikuti setiap arahan yang diberikan para fasilitator dan semua peserta bisa diajak kerja sama, di pelatihan ini kami diberikan materi tentang pengarahan pembukuan, masalah pengeluaran modal, bagai mana cara berwirausaha yang baik dan praktek membuat kue-

⁹⁴ Dani Rismala, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, Tanggal 08 Oktober 2018

kue. Semua pelajaran yang didapat sangat membantu kami dan setelah itu akan kami kembangkan⁹⁵.

Adapun pelaksanaan jadwal pelatihan kewirausahaan PMI Purna yang dilakukan BP3TKI di Balai Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur, tanggal 8-13 Oktober 2018 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Program Pemberdayaan



Waktu (menit)	Senin 8 Oktober 2018	Selasa 9 Oktober 2018	Rabu 10 Oktober 2018	Kamis 11 Oktober 2018	Jum'at 12 Oktober 2018	Sabtu 13 Oktober 2018
08.00-08.15	Registrasi	Registrasi	Registrasi	Registrasi	Registrasi	Registrasi
08.15-10.15	Pengenalan BNP2TKI, BP3TKI Lampung dan Program Pemberdayaan Terintegrasi BNP2TKI (BP3TKI Lampung)	Edukasi Keuangan (Trainer BP3TKI Lampung)	Pengelolaan Keuangan Usaha (Widyaiswara Balai Diklat Koperasi Provinsi Lampung)	Praktek Pembuatan Bolu dan Roti	Praktek Pembuatan Jajanan Pasar/Kue Tradisional	Penyuluhan Keamanan Pangan/cara Pengajuan PIRT (Dinkes Lampung Timur)
10.15-11.45	Cara Pengemasan Produk makanan (PLUT/Pusat Layanan Usaha Terpadu Lampung)	Edukasi Keuangan (Trainer BP3TKI Lampung)	Pengelolaan Keuangan Usaha (Widyaiswara Balai Diklat Koperasi Prov Lampung)	Praktek Pembuatan Bolu dan Roti	Praktek Pembuatan Jajanan Pasar/Kue Tradisional	Penyuluhan Keamanan Pangan/cara Pengajuan PIRT (Dinkes Lampung Timur)
11.45-12.45	ISHOMA(Istirahat Sholat dan makan)	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
12.45-14.15	Pengembangan Usaha Izin Usaha Pemasaran Produk dan	Keuangan (Trainer BP3TKI Lampung)	Trik Pemasaran (TDA Lampung)	Praktek Pembuatan Bolu dan Roti	Praktek Pembuatan Jajanan Pasar/Kue Tradisional	Rencana Aksi Kelompok

⁹⁵ Isma wati 32 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung, Wawancara, tanggal 14 Oktober 2018

Waktu (menit)	Senin 8 Oktober 2018	Selasa 9 Oktober 2018	Rabu 10 Oktober 2018	Kamis 11 Oktober 2018	Jum'at 12 Oktober 2018	Sabtu 13 Oktober 2018
	Pembinaan Pasca pelatihan (DISPERINDA G)					
14.15-14.30	Coffe break	Coffe break	Coffe break	Coffe break	Coffe break	Coffe break
14.30-16.00	Pengembangan Usaha Izin Usaha Pemasaran Produk dan Pembinaan Pasca pelatihan (DISPERINDA G)	Menabung Mengelola Pinjaman dan Kredit Usaha Rakyat BRI	Trik Pemasaran TDA Lampung	Praktek Pembuatan Bolu dan Roti	Praktek Pembuatan Jajanan Pasar/Kue Tradisional	MOU
16.00-16.45	Diskusi (Tanya jawab)	Riview Materi	Diskusi (Tanya jawab)	Diskusi (Tanya jawab)	Diskusi (Tanya jawab)	
16.45-17.00	Penutupan Hari 1	Penutupan Hari 2	Penutupan Hari 3	Penutupan Hari 4	Penutupan Hari 5	Penutupan Hari 6


Sumber data: Jadwal Kegiatan Bali BP3TKI di Lampung Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dalam tahap pengpasitasan ini masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan untuk lebih bisa mengelola usaha mandiri dengan potensi diri dari apa yang sudah diajarkan.

“Dalam pelatihan yang diberikan oleh BP3TKI memberikan pendamping an dan pembinaan berbagai narasumber seperti pelatihan trik pemasaran pointnya bagaimana cara mengemas produk dan promosinya dari komunitas tangan diatas Lampung oleh Pak Toni, pengelolaam keuangan dari Widyaiswara fungsional untuk mengajar pusdiklat oleh Pak Hendri mengajarkan bagaimanan tata cara pengelolaan usaha simulasi belajar akutansi sederhana, edukasi keuangan dari Treiner BP3TKI oleh Ibu Palupi dan Pak Waydinsyah, praktek usaha yang diangkat adalah Roti, Bolu, jajanan pasar oleh Amor bakery, Pengembangan Usaha Izin Usaha Pemasaran Produk dan Pembinaan Pasca pelatihan (DISPERINDAG) oleh Pak Teguh, Penyuluhan Keamanan Pangan/cara Pengajuan PIRT(Produk Industri Rumah Tangga) Dinkes Lampung Timur oleh Ibu Sri, Menabung Mengelola Pinjaman dan Kredit Usaha Rakyat BRI oleh Rachman”⁹⁶.

⁹⁶ Elok Fitricia, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, Tanggal 12 Oktober 2018

Penyampaian dari materi yang sudah diberikan oleh BP3TKI menyiapkan “kuesioner”⁹⁷ pre-test dan post-test pelatihan atau edukasi keuangan, kuesioner pre-test dan post-test pelatihan kewirausahaan untuk PMI Purna dan keluarganya. Untuk mengukur pemahaman peserta PMI Purna dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan.⁹⁸



Dilakukannya pemberian soal Kuesioner Pre-Test dan Post-Test Pelatihan Kewirausahaan PMI Purna untuk mengukur dan menilai pemahaman peserta pelatihan setelah diberikan materi-materi dari narasumber. Hasil penilaian yang sudah dikoreksi untuk soal Kuesioner Pre-Test dan Post-Test Pelatihan Kewirausahaan yang telah diisi jawaban nya oleh peserta, bahwasannya dari seluruh peserta pelatihan 85% dapat menjawab soal dengan benar dan 15% jawaban yang salah dari soal yang telah diberikan. Artinya peserta dapat memahami serta mengerti dari materi yang telah disampaikan dari pelatihan ini.

Bantuan peralatan, mitra usaha untuk menampung produk, koperasi PMI Purna, pameran produk di jakarta, Lampung fair, Way kambas fair, Pringsewu fair, permodalan bantuan serta informasi dalam mengatasi masalah usaha yang dihadapi PMI Purna⁹⁹. Pelatihan Kewirausahaan yang dilakukan adalah praktik pembuatan pada hari pertama pembuatan bolu dan roti bagaimana bahan yang diperlukan, cara pembuatan, dan pengemasan, hari kedua Praktek Pembuatan Jajanan Pasar/Kue

⁹⁷ Contoh kuesioner dapat dilihat pada lampiran

⁹⁸ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 09 Oktober 2018

⁹⁹ Elok Fitricia, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, Tanggal 12 Oktober 2018

Tradisional diajarkan juga untuk bahan, cara membuat, hasil akhir cara pengemasan. jadi bisa terima catering. Dalam pengkapisitasan nilai ada pengadaan bantuan untuk membantu memaksimalkan pelatihan kewirausahaan yang sudah diajarkan.

Pengadaan bantuan yang dimaksud adalah berupa bantuan open atau panggangan 3 unit , loyang kue 20 buah, mixer kue 2 buah dan uang kas untuk dijadikan modal usaha kelompok yang diberikan oleh BP3TKI. Tidak hanya pelatihan yang didapatkan oleh PMI Purna di Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru, melainkan mereka juga mendapatkan banyak bantuan untuk lebih bisa mengoptimalkan proses pengembangan usaha, dan potensi sumber daya manusia yang ada disetiap diri PMI Purna melalui pelatihan praktik pembuatan roti, bolu, kue dan jajanan pasar. Pengetahuan akan kemampuan yang sudah diberikan dalam membuat bolu, roti, dan kue jajanan pasar sebagai bentuk kegiatan usaha yang akan dilakukan mulai mereka tekuni. Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu serta mempermudah PMI Purna setelah pelatihan kewirausahaan terlaksana dalam mengembangkan awal usahanya dan tidak mengalami hambatan masalah serta kekurangan alat dan mereka mampu mandiri selanjutnya¹⁰⁰.

Bantuan yang diberikan oleh BP3TKI untuk PMI Purna dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kelancaran pengembangan tahap awal usaha setelah pelatihan kewirausahaan dilaksanakan. Mas Roni 43 tahun, sebagai ketua kelompok PMI Purna Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru yang telah dipilih peserta yang lain sebagai penanggung jawab untuk alat bantuan yang diberikan agar bisa dapat dipergunakan bersama-sama untuk mengembangkan usaha mereka.

¹⁰⁰ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 13 Oktober 2018

Mas Roni tersebut mengatakan bahwa bantuan alat open, loyang, serta mixer yang diberikan tersebut sangat membantu untuk kelancarannya mengembangkan usaha pembuatan roti, bolu dan kue jajanan pasar ini. Karena jika tidak ada akan mengalami kesusahaan untuk membuat usaha kue ini bisa berjalan dan akan sulit jika mendapat pesanan dalam jumlah banyak. Dari beberapa bantuan-bantuan yang diberikan nyatanya mampu membantu dalam pengembangan usaha PMI Purna Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru dengan membuka toko kue dan menerima pesanan atau katering yang dimulai dari tetangga, hingga luar daerah dapat mengalami peningkatan secara mandiri¹⁰¹.

Diadakannya pelatihan kewirausahaan yang diberikan semakin menyadarkan para PMI Purna untuk mengembangkan ilmu atau wawasan yang didapat dan dijadikan sebagai bekal atau pedoman untuk mereka membuka usaha yang sukses. Potensi diri yang dapat dikembangkan dan mereka mulai menarik minat PMI Purna lainnya untuk ikut serta dalam pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya ini.

Seiring berjalannya waktu program pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya telah menciptakan perubahan untuk kehidupan mereka serta membuat PMI Purna dan keluarganya menciptakan usaha yang mandiri yang berkembang, BP3TKI pun juga berupaya terus melakukan monitoring dan memberikan bantuan kepada PMI Purna yang mendapati masalah pada usahanya dengan memberikan bantuan baik secara moril dan materil demi untuk terus dapat menjalankan usahanya.

¹⁰¹ Mas Roni 43 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung, *Wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

c. Tahap Pendayaan (*Empowerment*)

Pada tahapan ini PMI Purna dan Keluarganya diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan ke mampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri. Setelah PMI Purna diberi pencerahan oleh BP3TKI, narasumber dan pihak-pihak lainnya ini mulai berkembang sendiri

(pemandirian) dengan mereka sudah bisa membuka toko kue dan sudah menerima katering berbagai bentuk jenis bolu, roti, kue jananan pasar dan mereka yang sudah mampu untuk membuka usaha sendiri.

Beberapa upaya yang telah dilakukan BP3TKI dan beberapa bantuan dari beberapa pihak serta narasumber untuk membantu menyadarkan para PMI Purna untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang disadari telah tertanam pada diri, dari hasil belajar, kemauan, keuletan, ketekunan serta motivasi diri, mereka mampu melepas diri yang tadinya setelah bekerja diluar negeri tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi buruh serabutan, mereka mulai memberanikan diri untuk bisa mandiri dan perlahan mereka mulai mendirikan usaha sendiri¹⁰².

“saya memiliki kelompok usaha PMI Purna ada 5 orang yang dibentuk pada saat pelatihan untuk mengembangkan usaha kami yang diberi nama Jamur bakery anggota Anin Khorida, Suryani, Suryati, dan Tri Wahyuni, pada saat pelatihan kami disuruh untuk membuat rencana aksi yang dimana rencana itu akan dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Saya sebagai ketua kelompok menempatkan membuka rumah produksi pertama di rumah anggota saya yang bernama Anin Khoridah, dengan uang kas patungan kamu 300/orang. Tahap pelaksanaan yang kami lakukan dengan mengumpulkan modal, setelah itu

¹⁰² *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 13 Oktober 2018

mempersiapkan tempat dan alat, mempersiapkan peralatan label, memulai usaha dan produksi, melakukan pemasaran dan pembukuan. Setelah rencana aksi yang kami buat kami melakukan praktek dengan menerima pesanan katering dari tetangga untuk acara hajatan. Kami harap ketekunan kami dari usaha kecil yang dilakukan dapat berangsur berkembang dan mendapatkan pesanan dan omset yang lebih banyak lagi. Kami siap menjadi PMI Purna yang berdaya dengan menjadi wirausaha mandiri yang dapat mensejahterakan keluarga.¹⁰³

Secara bertahap bukan hanya satu dua kelompok PMI Purna yang sudah memulai mendirikan usaha sendiri sebagai usaha olahan makanan, tetapi semua yang ikut pelatihan mulai membuka usaha dengan rencana aksi yang telah mereka buat dan bentuk komitmen dari keseriusan mereka membuka usaha. Dan juga sekarang mereka sudah mulai menjual hasil buatan kue jajanan pasar, bolu, roti ke pasar-pasar, dan menerima pesanan dari masyarakat daerah sekitar mereka tinggal. PMI Purna yang tidak memiliki pekerjaan dan kegiatan sekarang mulai aktif karena kehadiran BP3TKI untuk membangkitkan semangat kerja PMI Purna dapat memberikan peluang pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menambah penghasilan mereka dengan membuka usaha mandiri.

Adapun hal tersebut dapat dilihat dari tabel data sudah banyak program pemberdayaan untuk PMI Purna dan Keluarganya untuk menekuni usahanya sebagai pekerjaan dalam hal ini praktek pembuatan bolu, roti, dan jajanan pasar. Dari tabel tersebut menerangkan bahwa kehadiran program pemberdayaan BP3TKI memberikan perubahan dalam pola kehidupan PMI Purna terutama dalam bidang pekerjaan, dengan mereka memiliki pekerjaan sebagai wirausaha pembuka toko kue, secara tidak langsung mampu meningkatkan perekonomiannya serta mampu mengoptimalkan keterampilan mereka dalam berkreasi membuat aneka roti, bolu,

¹⁰³ Edi Waluyo 47 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung, *Wawancara*, tanggal 16 Oktober 2018

dan jajanan pasar yang tidak lain dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas SDM pada PMI Purna desa Teluk Dalam Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur agar menjadi PMI Purna yang berdaya dan sejahtera.

“Setelah dilaksanakannya Program Pemberdayaan untuk para PMI Purna ini Alhamdulillah dapat dipantau saat monitoring dapat berjalan dan berkembang, dan kami berusaha juga membantu para PMI Purna yang mengalami masalah pada usahanya jika kendala alat kami bantu carikan solusi dan izin PIRT untuk setiap produk makanan olahan yang dibuat, dan pemasaran kami mengambil produk mereka untuk di pasarkan dengan mitra usaha dan pameran seperti di Lampung Fair kemarin kami mengumpulkan semua produk buatan PMI Purna dari seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung, kami kumpulkan dan membuat stand khusus produk usaha PMI Purna yang semua tujuan dilakukannya itu mengenalkan usaha mandiri yang telah dilakukan PMI Purna agar masyarakat mengetahui hasil karya yang mereka buat.¹⁰⁴

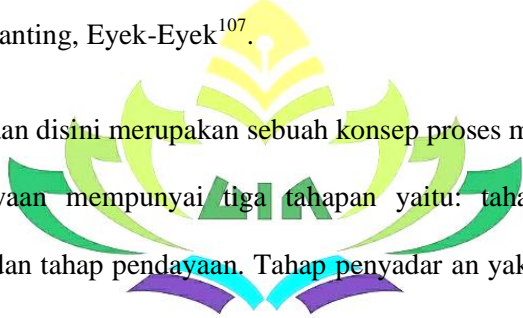
Selain membantu memberikan pekerjaan bagi PMI Purna kehadiran pelatihan pemberdayaan ini sangat bagus karena dapat membantu perekonomian PMI Purna serta memandirikan mereka dengan memiliki suatu usaha serta kemampuan dalam hal ini praktik yang dilakukan yakni¹⁰⁵ mengelola untuk membuka toko kue seperti bolu, roti dan aneka jajanan pasar sebagaimana yang telah diajarkan dengan banyak pengetahuan dan ilmu yang mahal yang diberikan didapat hanya ada di pelatihan pemberdayaan ini Tuter Suryati saat diwawancarai.

Sekarang banyak PMI Purna yang sudah menerima pesanan kue, dan sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan memesan. Hampir setiap hari PMI Purna di

¹⁰⁴ Waydinsyah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI, *Wawancara*, Tanggal 14 Oktober 2018

¹⁰⁵ Suryati 40 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung, *Wawancara*, tanggal 16 Oktober 2018

desa Teluk Dalam ini menerima pesanan kue untuk berbagai macam acara. Hal ini yang membuat desa-desa binaan dari BP3TKI sebagai kawasan sentral wirausaha PMI Purna yang ada di Lampung.¹⁰⁶ Terbukti dari adanya banner di setiap wilayah daerah binaan yang bertuliskan nama dari kelompok usaha PMI (Purna) berikut nama hasil produksinya contoh di Lampung Timur “Kelompok Usaha PMI (Purna) Sekar Arum Produksi Klanting, Eyek-Eyek¹⁰⁷.



Pemberdayaan disini merupakan sebuah konsep proses menjadi instan. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Tahap penyadaran yakni dimana masyarakat diberi sebuah pencerahan dalam artian untuk memberikan penyadaran bahwa mereka mampu untuk memilih sesuatu dan bahwa sannya mereka mempunyai kemampuan dan kapasitas yang luar biasa jika saja mereka mampu mengekspor dan menggali kemampuan dalam dirinya. Tahap kedua tahap pengkapasitasan yaitu tahap dimana masyarakat yang diberdayakan diberikan program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka memiliki skill dalam mengelola manajemen diri dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian tahap ketiga tahap pendayaan pada tahap ini mereka diberi daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki atau sesuai kecakapan penerima.

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut jika di implementasikan pada pelatihan *life skills* yang sasarannya adalah masyarakat miskin, tentu hal yang krusial bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pelatihan *life skills* PMI Purna mendapatkan keterampilan hidup sesuai dengan keahlian dan kemampuan

¹⁰⁶ *Observasi*, tanggal 10 Oktober 2018

¹⁰⁷ *Observasi*, Balai Desa Teluk Dalam Lampung Timur, tanggal 11 Oktober 2018

yang mereka miliki. Keterampilan ini akan menjadi pendorong memperbaiki perekonomian kelangsungan hidup mereka.

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat seperti yang diuraikan diatas, hanyalah salah satu contoh sederhana pada pengembangan kapasitas seperti pelatihan kewirausahaan *life skills*. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebuah konsep namun pemberdayaan juga memberi ruang kepada pengembangan kemampuan dan kapasitas manusia yang beragam dengan saling melengkapi satu sama lain. Pemberdayaan sebagai konsep manajemen harus mempunyai indikator keberhasilan pada ranah sasaran maupun instansi-instansi terikat. Artinya memiliki indikator keberhasilan pada kedua belah pihak. Pada akhirnya, konsep pemberdayaan PMI Purna dalam kewirausahaan yang berbasis pelatihan *life skills* akan mampu melahirkan PMI Purna yang kreatif dan berdaya saing. Dengan kreativitas keterampilan *life skills* yang dimiliki mampu menopang kesejahteraan perekonomian sekaligus menciptakan kemandirian tanpa banyak bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan *life skills*, sejatinya berorientasi pada perubahan-perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya mereka.

BAB IV

ANALISIS FUNGSI LEMBAGA (BP3TKI) DALAM PEMBERDAYAAN PMI PURNA

A. Fungsi Lembaga (BP3TKI) Dalam Pemberdayaan Pmi Purna

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada BAB III, apa yang telah dilakukan BP3TKI dengan menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Fasilitator pemberdayaan dalam mencoba untuk memberdayakan PMI Purna dan keluarga nya, sudah dijalankan dengan baik dan semuanya sesuai pada konsep teori yang digunakan pada BAB II tentang tahap-tahap dalam melaksanakan pemberdayaan PMI Purna. Semua tahapan mulai dari tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan telah di upayakan dengan baik oleh BP3TKI, begitu pun dengan PMI Purna mampu meresponnya dengan antusias secara bertahap dan menunjukkan hasil.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BP3TKI tersebut bertujuan untuk membantu memperbaiki kehidupan PMI Purna di Desa desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur bahkan setelah mengupayakan tahap penyadaran dan pengkapasitasan, serta juga mengupayakan tahapan pendayaan dengan memberikan motivasi juga dorongan dan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk kemudian berani untuk mendirikan usaha sendiri agar bisa lebih mandiri dan hal tersebut dapat menjadikan BP3TKI sebagai lembaga yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja

Indonesia Purna Dan Keluarganya. BP3TKI terus meningkatkan kinerja nya untuk menggapai para PMI Purna diseluruh wilayah khususnya Lampung menjadikan PMI Purna yang mandiri dan sejahtera. Tidak hanya itu fungsi BP3TKI dalam pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi dengan pengembangan kapasitas dan pemberian akses guna meningkatkam kualitas SDM melalui tahapan pemberdayaan juga telah membawa keberhasilan dari penelitian yang dilakukan oleh studi terdahulu yang juga berhubungan dengan pemberdayaan pekerja migrasi Indonesia di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis telah menjelaskan bahwa semua tahapan yang di upayakan telah dilakukan dengan baik oleh fasilitator dan telah sesuai dengan konsep teori, dan pada tahap pendayaan tetap dilakukan oleh fasilitator meskipun pemberdayaan tersebut sudah berjalan sampai saat ini.

Peningkatan pada ekonomi PMI Purna di Lampung Timur terjadi karena adanya sebuah proses untuk meningkatkan kualitas potensi sumber daya manusia yang ada disetiap jiwa masyarakat apabila dikelola dengan baik dan benar. Proses meningkatkan kualitas potensi SDM tersebut dipicu dengan hadirnya BP3TKI dalam pelatihan kewirausahaan dengan pembuatan roti, bolu, dan jajanan pasar, membuat PMI Purna yang sebelumnya ini tidak memiliki keterampilan *life skils* menjadi bisa memiliki keterampilan untuk berupaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori BAB II pada halaman 57, dimana fungsi BP3TKI dengan melakukan Pemanfaatan SDM dalam proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut dua hal. Pertama, peningkatan dan pengembangan kualitas, kedua, pemanfaatannya ini melalui berbagai peluang,

aktifitas dan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup PMI Purna dan keluarganya.

Fungsi dan tugas dari BP3TKI guna memberikan pemberdayaan PMI Purna dalam memaksimalkan potensi serta kualitas SDM yang dilakukan oleh *stakeholder*, narasumber, dan mitra terkait pemberdayaan atau fasilitator dibantu oleh beberapa pihak seperti CO-KKBM dan Perangkat Desa serta adanya kemauan dari PMI Purna, secara tidak langsung memberikan perubahan ekonomi PMI Purna di wilayah Lampung Timur sebelumnya mayoritas PMI Purna di daerah tersebut tidak memiliki pekerjaan dan menganggur dirumah, kini berubah menjadi kawasan sentral industri olahan makanan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI Purna salah satunya perilaku konsumtif dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi serta menuntut PMI Purna untuk bangkit untuk mencari peluang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak sangat sulit didapatkan bagi PMI Purna di Lampung Timur karena kebanyakan hanyalah tamatan Sekolah Dasar, SMP dan sedikit lulusan SMA/SMK serta mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan hasil pendapatan/gaji yang didapat selama bekerja diluar negeri. Padahal mereka tidak menyadari bahwa ada potensi dan peluang usaha yang mereka miliki yang bisa dikembangkan untuk dijadikan tumpuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Manfaat dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh BP3TKI tersebut dapat dilihat dan disadari hasilnya oleh PMI Purna yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan berhasil membuka usaha secara mandiri. Dan saat ini, PMI purna

tersebut, menjadi contoh sekaligus menjadi pelopor pemberdayaan CO-KKBM serta mengajak PMI Purna lainnya untuk ikut serta dalam pelatihan kewirausahaan yang diberikan dan memaksimalkan dalam melaksanakannya. Program Pemberdayaan Pekerja Migrasi Indonesia Purna yang dilakukan oleh BP3TKI sebanyak 30 Paket yang terlaksana dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 dan tersebar diseluruh Kabupaten di Provinsi Lampung dan berbagai jenis pelatihan kewirausahaan. Hal ini sesuai pemaparan dari BP3TKI dalam pemberdayaan PMI Purna halaman 77 di BAB III. Namun, adanya potensi pada setiap diri PMI Purna bukan berarti merupakan hal yang mudah untuk bisa langsung menyadarkan dan mengajak PMI Purna yang memiliki beragam karakteristik dan berbeda-beda pemikirannya, untuk menyadari semua itu masyarakat membutuhkan sebuah proses atau tahapan.

Adapun proses atau tahapan tersebut diupayakan oleh BP3TKI sebagai fasilitator pemberdayaan, Seperti yang telah dipaparkan dihalaman 43 BAB II. Bertitik tolak dari teori Ayub M. Padangaran tentang tahap-tahap pemberdayaan. Adapun tahap-tahap tersebut diantaranya, tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

1. Tahap Penyadaran

Adapun pada tahap ini, BP3TKI sudah megupayakannya dengan baik, dia berusaha meyadarkan dan membangun kesadaran PMI Purna di Lampung Timur dengan memberikan pencerahan, motivasi, pengetahuan melalui obrolan dan pertemuan, memberikan pengetahuan dan membuka wawasan agar bisa menyadarkan PMI Purna bahwa mereka memiliki potensi sumber

daya yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Penyadaran ini dilakukan dengan tahapan kesadaran, keinginan, evaluasi. Pertama tahap kesadaran (*awareness*) diberikan sosialisasi dan arahan untuk ikut serta pelatihan kewirausahaan dan diberikan juga pembekalan dengan pemberian motivasi, dan membuka wawasan pengetahuan, dan dapat memunculkan minat PMI keinginan (*interest*) timbul minat berupa keinginan dari dalam hati yang dapat mendorong dan menguatkan kesadaran diri untuk berubah, dan evaluasi akan terjadi penilaian terhadap suatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan.

BP3TKI memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi, belief, dan healing*. Prinsip ini pada dasarnya adalah membuat target atau PMI Purna yang mau ikut serta dalam pelatihan kewirausahaan, dan mengerti bahwa mereka perlu membangun sebuah kesadaran kemudian diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri bukan dari luar. Jadi, pada intinya adalah penyadaran mereka yang diberdayakan untuk membangun kesadaran diri bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk membangun “*capacity self*”.

2. Tahap Pengkapasitasan (*Capacity Building*)

Adapun pada tahapan pengkapasitasan ini, telah dilakukan dengan sangat baik oleh BP3TKI, selaku fasilitator lembaga tersebut, telah melakukan upaya pengkapasitasan pasca PMI Purna berhasil melalui tahap penyadaran. Upaya pengkapasitasan tersebut dilakukan dengan memberikan keterampilan,


pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam membuat usaha kuliner, seperti kue bolu, roti dan jajanan pasar. Dalam tahap ini, BP3TKI juga dibantu oleh *Stakeholder*, Mitra usaha, dan Dinas terkait dalam pemberian pelatihan kewirausahaan. Pihak-pihak tersebut turut andil dalam mengoptimalisasikan berjalannya pelatihan yang diberikan oleh BP3TKI, dengan memberikan bantuan berupa peralatan membuat kue, seperti loyang, teflon, open, dan mixer kepada peserta (yaitu PMI Purna) yang mengikuti kegiatan pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan yang diberikan oleh BP3TKI diantaranya melakukan pemberian berupa pendampingan dan pembinaan berbagai narasumber seperti pelatihan manajemen kewirausahaan, keterampilan produksi, bantuan peralatan, permodalan juga serta informasi berikut pelatihan trik pemasaran dengan mengemas produk dan, pengelolaan keuangan tata cara pengelolaan usaha simulasi belajar akutansi sederhana, edukasi keuangan, praktek usaha, Pengembangan Usaha Izin Usaha Pemasaran Produk dan Pembinaan Pasca pelatihan, Penyuluhan Keamanan Pangan atau cara Pengajuan PIRT, Menabung dan mengelola Pinjaman dan Kredit Usaha Rakyat BRI. Praktek usaha berupa keterampilan produksi yang dimaksud disini adalah pembuatan usaha roti, bolu, jajanan pasar.

3. Tahap Pendayaan (*empowerment*)

Tahapan-tahapan yang dilakukan dengan baik sebelumnya oleh BP3TKI telah mengantarkan PMI Purna yang berdayakan pada tahapan yang terakhir, yakni tahap pendayaan dimana setelah masyarakat disadarkan

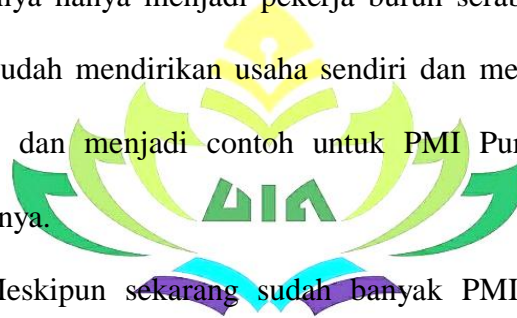
dan berikan kapasitas berupa pengetahuan, wawasan dan keterampilan serta pengadaan bantuan kemudian selanjutnya adalah masyarakat yang diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.



BP3TKI telah berhasil melaksanakan Fungsi *Enabling* atau Fasilitasi yang dilaksanakan melalui tahap-tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga PMI Purna yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan dalam berwirausaha kini setelah mereka diberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan, mereka mampu untuk membuka usaha dan menerima pesanan bolu, roti maupun jajanan pasar lainnya, dan usaha pembuatan kue tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan dan sangat membantu perekonomian kehidupannya. Secara keseluruhan BP3TKI sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam pemberdayaan PMI Purna dengan pelatihan kewirausahaan menjadikan PMI Purna yang bekerja sesuai tata cara komit bahagiakan keluarga pulang jadi wirausaha.

Meskipun sudah banyak PMI Purna dan keluarganya yang sudah mampu mengembangkan usahanya tidak membuat BP3TKI lepas tangan begitu saja dengan tetap memantau kemampuan PMI Purna bahkan semakin mengarahkan menuju kemandirian melalui pemberian bantuan berupa alat sarana dan prasarana juga motivasi, dorongan serta informasi dan wawasan yang tiada hentinya akhirnya membuahkan hasil dan membuat beberapa PMI

Purna memberanikan diri untuk mulai mendirikan dan memiliki usaha sendiri dan berjalan sampai sekarang dimana sekarang PMI Purna di Lampung Timur yang sebelumnya kebanyakan tidak memiliki pekerjaan justru sekarang menjadi masyarakat yang memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, PMI Purna yang tadinya hanya menjadi pekerja buruh serabutan kini sudah ada beberapa yang sudah mendirikan usaha sendiri dan menerima pesanan dari luar wilayahnya dan menjadi contoh untuk PMI Purna lainnya atas keberhasilan usahanya.



Meskipun sekarang sudah banyak PMI Purna yang sudah mendirikan dan memiliki usaha sendiri tidak membuat BP3TKI berhenti untuk melakukan pemberdayaan lantas membuat BP3TKI semangat untuk mencari wilayah yang terdapat kantong-kantong PMI Purna yang belum tersentuh dengan bantuan yang diberikan Pemerintah. Dari upaya yang dilakukan menyadarkan PMI Purna hingga akhirnya sekarang banyak yang sudah mandiri merasa bangga upayanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini dapat dinikmati oleh PMI Purna untuk tetap bisa mempertahankan perkembangan pada PMI Purna dan keluarganya. BP3TKI tetap memberikan pengetahuan, informasi, wawasan, bantuan sarana dan prasarana, menjaga komunikasi yang baik pasca pelatihan membantu memberikan solusi juga jalan keluar bagi usaha PMI Purna yang mengalami hambatan dan terus memberikan motivasi dan informasi kepada PMI Purna

yang sudah memiliki usaha sendiri tujuannya untuk tetap menjaga silahturahmi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariftiartiningsih pada tahun 2015, oleh Ayu Wulandari pada tahun 2017, oleh Susi Karyati tahun 2018, sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa fungsi yang dilakukan BP3TKI dalam pemberdayaan PMI Purna sangat di dominasi oleh BP3TKI sebagai fasilitator yang menjalankan tugas dan fungsi pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi mulai dari tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan telah dilakukan dengan baik melalui beberapa langkah-langkah disetiap tahapan yang merujuk pada teori tahapan pemberdayaan dari Ayub M. Padangaran dalam melakukan upaya untuk pengembangan kapasitas meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kewirausahaan membuat bolu, roti, dan jajanan pasar.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariftiartiningsih, dimana pada penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa dalam proses pemberdayaan menggunakan pola pemberdayaan yang menggunakan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yakni proses pembangunan dimana pada generasi-generasi mendatang memperoleh modal sebanyakya lebih pada saat sekarang, kemudian dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dengan upaya pemberian pelatihan pembuatan

manisan sari buah salak dan batik tradisional Wonosobo. Dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan hanya upaya pengkapasitasan saja.

Penelitian oleh Ayu Wulandari, dimana pada penelitian yang dilakukan nya menggambarkan implementasi strategi BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB di Provinsi Lampung Tahun 2016 dan kendala yang di hadapi oleh BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB. Pengimplementasian strategi-strategi yang dimiliki oleh BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB berjalan cukup baik. Membahas permasalahan dan kendala-kendala dari BP3TKI dalam pelaksanaan strategi.

Penelitian oleh Susi Karyati dimana penelitian yang dilakukan strategi pelaksanaan program desa migran produktif menemukan dan pembinaan pelaksanaan program desmigratif. Program Desmigratif mampu mengubah pola pikir dalam memilih upaya untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam upaya pemberdayaan ini yang di lakukan hanya upaya penyadaran dan pemberian pada pengkapasitasan saja.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan melakukan analisa terhadap temuan penelitian dalam skripsi ini, yang berjudul “Fungsi BP3TKI dalam Pemberdayaan PMI Purna di Lampung Timur”. Maka fungsi BP3TKI disimpulkan sebagai berikut :

BP3TKI menjalankan fungsi pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, hal tersebut terlihat dalam proses penyadaran tentang potensi yang dimiliki oleh PMI Purna, kemudian memberikan pembinaan dan pendampingan kepada PMI Purna mulai dari pelatihan kewirausahaan, keterampilan produksi, serta ada pengadaan bantuan dari beberapa pihak yang juga ikut membantu untuk memaksimalkan usaha tersebut, serta PMI Purna diberikan kesempatan untuk mengembangkan apa yang sudah mereka dapatkan. Sehingga PMI Purna mampu untuk membuka usaha.

Tujuan dari pengembangan kapsitas ini baik dari tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. sudah berjalan dengan baik dari yang awalnya PMI Purna tidak memperdulikannya kemudian menjadi antusias dan ikut berpartisipasi. Yang awalnya banyak pengangguran dan di dominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai serabutan yang penghasilannya tidak menentu sekarang PMI Purna dan keluarganya bisa membuka usaha mandiri sendiri, dengan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Pentingnya membangun sebuah kesadaran diri pada PMI Purna dan keluarga

nya bahwa mereka memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan menyadari bahwa dimana mereka tinggal maka akan ada pula potensi sumber daya yang tersedia dan dapat dikelola dengan baik serta dimanfaatkan sebagai penunjang untuk kehidupan, sumber daya tersebut akan mampu dimanfaatkan jika menyadari keberadaannya dan dikembangkan seperti yang telah dilakukan BP3TKI yang mencoba menyadarkan PMI Purna bahwa mereka memiliki potensi yang jika dikembangkan dengan diberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan *life skills*, dorongan, motivasi maka akan mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan dan kemandirian bagi PMI Purna dan keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Kepada BP3TKI, dilihat dari pelaksanaannya pelatihan kewirausahaan PMI Purna ini kiranya BP3TKI pasca pemberdayaan tetap mendampingi dan memonitoring PMI Purna dan keluarganya agar tetap terjaga dan berjalan serta makin berkembang kualitas usahanya dan bahkan bisa menjadi PMI Purna yang benar-benar semuanya bisa mandiri dalam berwirausaha, karena dengan semakin berkualitasnya keterampilan dan pengetahuannya bisa membuat PMI Purna untuk mendirikan usaha sendiri yang maju serta memberikan peluang pekerjaan dan membuat label usaha khusus PMI Purna.
2. Kepada PMI Purna, Melihat prospeknya yang bagus dari pelatihan kewirausahaan ini maka hendaknya tetap meningkatkan kemampuannya

dalam berkreasi membuat usaha yang unik dan berbeda yang memiliki ciri khas untuk PMI Purna agar nantinya bisa semakin banyak yang mampu untuk mendirikan usaha sendiri, merespon dan menanggapi upaya pengembangan kapasitas yang berjalan dengan tiada hentinya mengembangkan pengetahuan yang didapatkan pada saat proses pelatihan kewirausahaan.

C. Penutup

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga kerja keras yang selama ini dilakukan benar-benar bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca sekalian. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsannudin Mudi. 2004. *Profesional Sosiologi*. Jakarta:Mendiatama

Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media

Al-Barry. M.D.J dan Sofyan Hadi. 1999. *Kamus Ilmiah Komtemporer*. Bandung : Pustaka Setia

Aprillia Theresia dkk. 2014. *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Ayub M. Padangara. 2011. *Proyek Pengembangan Masyarakat, Konsep Teori Dan Aplikasi*. Kendari: Unhalu Press

Basri Ms. 1997. *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik*. Jakarta: Restu Agung

Buku Profil BP3TKI Lampung. Lampung : BNP2TKI. 2018.

D. Hendropuspito.OC. 1989. *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta : Penerbit Kasius

Edy Suharto Ph.D. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Hadari Nawawi. 2003. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press

Husaini Utsman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Irwan. 2017. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta : Absolute Media
Kartini Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar
Maju

Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia. 2007. *Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia*. Jakarta : LAN

Mahi M. Hikmat. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan
Sastra*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Oss M. Awas. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Peter Burke. 2003. *Sejarah Teori Dan Sosial*. Terj. Mustika Zed dan Zulfani. Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia

Philipus & Nurul Aini. 2011. *Sosiologi dan Politik* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen*. (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2016.

Edy Sutrisno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group

Soeroto. 1983. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta:
Gajahmada Press

Soerjono Soekamto. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sofyan Effendi dkk. 1996. *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Sunapiyah Faisal. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada



Totok Mardikanto & H.Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Skripai Ayu Wulandari, *Implementasi Strategi Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah*, (Bandar Lampung : Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung,2017).

Skripsi Arifiartiningsih, *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*,(Yogyakarta : Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Skripsi Susi Karyati, *Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Apmd), 2018).

Sumber: Data www.bnp2tki.go.id

HASIL WAWANCARA

Pengurus BP3TKI yakni :

- a) Bapak Waydinsyah selaku (Kepala Seksi bidang Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung).

Latar belakang terbentuknya Pemberdayaan PMI Purna ini pada dasarnya Program wajib Pemerintah yang melihat karena banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada mereka dan berdasarkan hasil pantauan tentang kehidupan PMI ini malah setelah kepulangannya mereka tidak memiliki pekerjaan apapun dan penghasilan yang didapat itu tidak dikelola dengan maksimal makanya mereka cenderung konsumtif yang menyebabkan ekonomi hidupnya semakin susah. Terbentuk nya Program Pemberdayaan ini untuk membantu mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. Program Pemberdaya an ini sudah dilaksanakan pada tahun 2015 hingga sekarang ada 30 paket yang tersebar untuk seluruh kabupaten yang terdapat banyak kantong-kantong PMI Purna banyak hasil juga yang sudah berhasil dalam mengikuti pelatihan ini. Banyak pula masalah yang kembali mereka keluhkan pada saat dilakukan monitoring dilapangan dan via telpon dan ada grup whatshap untuk seluruh PMI Purna untuk tentang masalah usahanya seperti alat dan izin PIRT

yang sulit didapat jadi kami membantu memberikan solusi dan fasilitasi kembali untuk masalahnya tersebut. Kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk PMI Purna dan Keluarganya agar mereka merasakan kehidupan yang baik. Untuk kedepan nya saya ingin mewujudkan mengenai pemberdayaan kembali untuk anak-anak PMI Purna yang ditinggal orang tuanya pergi keluar negeri yang diharapkan dapat menghibur mereka dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk memberi tempat mereka bernaung juga. Saya harap program tersebut akan segera terlaksana dan berjalan lancar dan BP3TKI bisa membuktikan kinerja mereka yang terbaik yang diberikan¹⁰⁸.

b) Praja Setiawati (Staff Pengelola Perlindungan dan Pemberdaya an BP3TKI Lampung)

Masalah pada kendala kegagalan pada PMI Purna setelah pelatihan kembali lagi faktor terbesar itu ada dalam pada diri peserta jadi seberapa bagus persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia dan narasumber dan sebgus apa narasumber juga memberikan motivasi kepada peserta tapi kalo dari peserta tidak ada keinginan yang lebih untuk meningkatkan kapasitas dirinya itu susah. Faktor tersebarnya itu dari diri peserta. Menurut saya itu lebih utama faktor internal pada diri

¹⁰⁸ Waydinsyah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI, *Wawancara*, Tanggal 14 Oktober 2018

peserta keinginannya itu kurang. Faktor eksternal ada teman-teman yang semangat tapi untuk bahan bakunya mahal dan pemasaran yang sulit jadi membuat PMI Purna lesu. Yang paling penting adalah ada pada 3 faktor jika faktor tersebut ketemu maka akan jalan usahanya. Kita fasilitasi teman-teman yang mau berkembang. Harapan ketika mendorong teman-teman yang terbaik dengan semangat dan yang lainnya ikut dengan adanya perhatian dari BP3TKI¹⁰⁹.

c) Dani Rismala (Staff Pengelola Penyiapan PMI BP3TKI)

PMI itu ada 2 ada namanya PMI Formal dan PMI Informal, kalau PMI Formal PMI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum misalnya seperti perusahaan, restoran, hotel, rumah sakit, kalo Informal bekerja pada pengguna perseorang atau pribadi majikan dengan ART atau PLRT (penata laksana rumah tangga). PMI Formal batas usianya 18 tahun minimal dan Informal 21 tahun sesuai UUD 39 tahun 2014. Informal tergantung dari Job order yang ditawarkan oleh negara penempatan atau lowongan pekerjaan dengan klasifikasi ada yang tidak tamat SD juga tak apa yang penting bisa membaca. PMI yang bekerja diluar negeri ada 5 cara, pertama PTP (Private to Private) dengan memakai PJTKI lewat PT swasta yang ditempatkan keluar negeri, kedua GTP (Government to Private) jadi dari Pemerintah Indonesia ke rumah sakit di Arab dari Pemerintah, GTG (Government

¹⁰⁹ Praja Setiawati, Staff BP3TKI, Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2018

to Gaverment) dari Peme rintah Indonesia ke Pemerintah luar negeri saat ini masih Korea dan Jepang dengan daftar Online web BNP2TKI, keempat PMI Mandiri adalah PMI Profesioanal yang *High Skill* dengan posisi yang bergengsi dengan mencari lowongan sendiri lewat internet atau memiliki keluarga yang bekerja diluar negeri. Kelima KPS Untuk (kepentingan perusahaan sendiri) contoh mengirim dari perusahaan honda yang ada disini dan ada di Jepang harus ada Perusahaan yang memiliki cabang di Luar negeri. Jadi BP3TKI tuganya pada akhir tahapan PMI mau keberangkatan yakni memberikan pembekalan akhir pemberangkatan minimal 1 hari dan selama 10 jam diberikan 5 materi ada perjanjian kerja ada peraturan undang-undang negara stempat ada adat istiadat negara penempatan, mental setelah pembekalan selesai ada nama nya sidik jari pengganti KTKL (kartu tenaga kerja luar negeri) sekarang digital sidik jarinya E-KTLN jadi terdaftar di sistem¹¹⁰.

d) Asma Zahratun (Ketua Kelompok Jabatan Fungsional).

Peserta yang ikut pelatihan ini adalah PMI Purna yang tersaring memenuhi kriteria seleksi dengan minat dan komitmen jumlah peserta yang ikut seleksi ada 75 orang tiga kali lipat dari penerimaan peserta yaitu 25 orang dilakukan penyaringan untuk mencari peserta yang benar-benar berniat untuk mengikuti pelatihan

¹¹⁰ Dani Rismala, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Tanggal 11 Oktober 2018

pembuatan kue yang sudah ditetapkan, meminimalisir suami istri ikut serta agar tersebar keseluruh PMI Purna, dan yang bersangkutan tidak boleh masih kembali bekerja diluara dan informasi untuk calon peserta yang bisa ikut serta pelatihan di umumkan oleh kepala desa. Membutukan komitmen peserta dari awal karena akadnya 6 hari pelaksanaan, ketika ada kejadian peserta hari pertama hadir hari kedua hadir tanpa keterangan untuk dilakukan didiskualifikasi dan langsung mengganti peserta lain jika izin urgen bisa diberikan izin karena yang diinginkan BP3TKI ini agar usaha nya langgeng dan jika sudah tidak ada kegairahan dari peserta langsung di gantikan dengan peserta lain. Syarat yang paling utama adalah mantan PMI yang pemulangan 5 tahun dan gak lebih 5 tahun, kedua adalah keluarga dari PMI yang masih keluar negeri karena keluarga ini merupakan inti dari pengelolaan keuangan dengan menerima hasil transferan, banyak kejadian dimana PMI tersebut tidak mampu menggunakan gaji dan tabungan secara baik karena memang keluarga tidak punya edukasi tentang pelatihan ini akhirnya habis saja untuk kebutuhan sehari-hari padahal tujuan utama PMI bekerja keluar negeri adalah untuk mencari modal bagaimana modal bisa terkumpul jika keluarga yang menerima tidak dapat mengelola dengan baik. Syarat dokumen jika keluarga mengisi lembar identifikasi calon peserta harus ada surat keterangan keluarga PMI dari kepala desa harus ada persetujuan keluarga, ktp dan

foto, untuk PMI Purna harus ada paspor, KTKLN, bukti pernah bekerja sebagai PMI surat persetujuan keluarga dan foto¹¹¹.

e) Elok Fitricia (Pengelola Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program BP3TKI)

pemberdayaan kita ini melibatkan stake holder lain jadi terkoneksi gak cuman BNP3TKI jadi kita melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan ada bantuan alat mereka dapat memberikan bantuan, dan terintegrasi sama mitra usaha juga untuk menampung, dan dinas kesehatan untuk izin PRT untuk bisa membantu failitasi dan bisa masuk Indomaret dan lainnya untuk olahan makanan. Setelah sudah dibekali ilmu silakan berkembang mandiri kami selalu memonitoring dan support. Setiap ada event di Lampung kami masukin kami cari dan membuat stand lebih enak karena kerjasama Pemerintah BP3TKI harus kreatif untuk ikut kedalam acara event yang ada di Lampung. Seperti Pameran yang ada di Jakarta, Lampung Fair, Lampung Timur Waykambas fair, Pringsewu Fair¹¹².

1) PMI Purna Lampung Timur

a) Liswati 45 tahun

Saya PMI Purna dari Taiwan selama 8 tahun penghasilan atau gaji yang saya dapatkan selama bekerja diluar negeri di Taiwan

¹¹¹ Asma Zahratun, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Tanggal 10 Oktober 2018

¹¹² Elok Fitricia, Staff BP3TKI , *Wawancara*, Tanggal 10 Oktober 2018

sebagai PRT sangat besar untuk saya dan satu bulan saya bisa mendapatkan 8 juta pada tahun 2012, dari hasil banting tulang saya bekerja disana anak saya bisa sekolah dengan lancar dan kebutuhan bisa terpenuhi saya bisa beli kebun, beli perkarangan. Dan pekerjaan saya sekarang setelah pulang dari luar negeri hanya menjadi pengampas makanan ringan saja dengan dagang keliling. Minat saya ikut pelatihan disini untuk menambah ilmu dan wawasan sehingga kita semua bisa menjalankan atau mengeluarkan pemikiran seperti unek-unek yang dirasakan dari pelatihan kewirausahaan ini saya pingin belajar dari sini agar kedepan nya lebih bagus, dari saya bekerja diluar negeri belum ada usaha atau pekerjaan yang akan saya lakukan kedepannya, tapi dari pelatihan ini insyallah saya akan buka usaha roti. Program ini sangat bagus dilakukan jika kita tidak dilakukan rugi besar banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ilmu-ilmu yang sangat mahal yang tidak bisa didapatkan diluar sana. Rencana aksi yang saya buat dengan kelompok disini saya sebagai ketua kelompok toko kue bougenvile anggota saya bernama Tri wardhani sebagai sekretaris, Asti aulia sebagai bendahara, M. Agus dan Tunik sebagai anggota. Pertama yakni menentukan rumah produksi dirumah saya setelah itu perencanaan produksi, mengumpulkan modal 300ribu dan bahan serta menyusun rencana keuangan, merencanakan rute dan waktu pemasaran, dan memulai produksi dan pemasaran

memasukan/pembukuan keungan. Harapan saya dari pelatihan ini dapat mengembangkan usaha dengan kelompok dan teman-teman PMI lainnya, kami semua semangat menjalankannya¹¹³.

2) Mas Roni 46 tahun

PMI Purna dari Malaysia selama 4 tahun pendapatan saya selama menjadi PMI sekitar 9 juta tahun 2016 saya sebagai ketua kelompok PMI Purna Desa Teluk Dalam Kecamatan Mataram Baru saya dipilih sebagai penanggung jawab untuk alat bantuan yang diberikan agar bisa dapat dipergunakan bersama-sama untuk mengembangkan usaha kami. Mas Roni juga sbagai ketua kelompok Ogan Bakery anggota saya Vera Ratna sebagai sekretaris, Sundayah sebagai bendahara, Mutiah dan Mustaginah sebagai anggota, yang memiliki rencana aksi untuk rumah produksi di rumah anggota saya ibu Sundayah setelah itu pengumpulan modal 300ribu, persiapan produksi, waktu produksi, dan waktu pemasaran. Harapan saya juga kelompok saya dapat bekerja sama untuk mengembangkannya usaha ini agar dapat sukses nanti kedepannya¹¹⁴.

3) Edi Waluyo 47 tahun

¹¹³ Liswati 45 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

¹¹⁴ Mas Roni 43 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

PMI Purna asal Taiwan selama 4 tahun hasil yang saya bisadapat 8 juta satu bulan. Saya memiliki kelompok usaha PMI Purna ada 5 orang yang dibentuk pada saat pelatihan BP3TKI untuk mengembangkan usaha kami yang diberi nama Jamur bakery anggota Anin Khorida, Suryani, Supriyati, dan Tri Wahyuni, pada saat pelatihan kami disuruh untuk membuat rencana aksi yang dimana rencana itu akan dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Saya sebagai ketua kelompok menempatkan membuka rumah produksi pertama di rumah anggota saya yang bernama Anin Khoridah, dengan uang kas patungan kamu 300/orang. Tahap pelaksanaan yang kami lakukan dengan mengumpulkan modal, setelah itu mempersiapkan tempat dan alat, mempersiapkan peralatan label, memulai usaha dan produksi, melakukan pemasaran dan pembukuan. Setelah rencana aksi yang kami buat kami melakukan praktek dengan menerima pesanan katering dari tetangga untuk acara hajatan. Kami harap ketekunan kami dari usaha kecil yang dilakukan dapat berangsur berkembang dan mendapatkan pesanan dan omset yang lebih banyak lagi. Kami siap menjadi PMI Purna yang berdaya dengan menjadi wirausaha mandiri yang dapat mensejahterakan keluarga¹¹⁵.

4) Isma Wati, 32 tahun

¹¹⁵ Edi Waluyo 47 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 16 Oktober 2018

PMI Purna asal Taiwan selama 3 tahun dan penghasilan saya satu bulan sekitar 9 juta tahun 2017. Untuk saya pelatihan pemberdayaan kewirausahaan dari BP3TKI ini sangat diperlukan agar PMI Purna dapat mengetahui tentang pemberdayaan kewirausahaan dan mengenai pelatihan dan dapat berlanjut untuk PMI Purna yang lainnya sangat perlu ikut serta dan kami sangat beruntung untuk mendapatkan kesempatan ini, semua peserta hadir terus selama 6 hari termasuk saya semua peserta ada 25 dibagi 1 kelompok ada 5 orang, kami sangat antusias mengikuti setiap arahan yang diberikan para fasilitator dan semua peserta bisa diajak kerja sama, di pelatihan ini kami diberikan materi tentang pengarahan pembukuan, masalah pengeluaran modal, bagaimana cara berwirausaha yang baik dan praktek membuat kue-kue. Semua pelajaran yang didapat sangat membantu kami dan setelah itu akan kami kembangkan¹¹⁶. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota saya Sri Riyanti sebagai sekretaris, Siti Kholifah sebagai bendahara, Fuji Maikha dan Malik sebagai anggota. Toko kue Teratai membuat rencana aksi rumah produksinya di rumah Siti Kholifah pertama pengumpulan modal 300rb setelah itu membeli bahan yang diperlukan saya dan kelompok akan membuat kue dan jajanan pasar.

¹¹⁶ Isma wati 32 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 14 Oktober 2018

5) Suryati 40 tahun

PMI Purna dari Malaysia selama 3 tahun penghasilan saya selama bekerja diluar negari 7 juta satu bulannya pada tahun 2014.¹¹⁷ Menurut saya Program pemberdayaan dari BP3TKI ini selain membantu memberikan pekerjaan bagi PMI Purna kehadiran pelatihan pemberdayaan ini sangat bagus karena dapat membantu perekonomian PMI Purna serta memandiri kannya dengan memiliki suatu usaha serta kemampuan dalam hal ini praktik yang dilakukan untuk mengelola membuka toko kue seperti bolu, roti dan aneka jajanan pasar sebagaimana yang telah diajarkan banyak pengetahuan dan ilmu yang mahal yang diberikan didapat hanya ada di pelatihan pemberdayaan ini. Saya sebagai ketua kelompok toko kue cantik manis dan anggota saya bernama Simi Linda sebagai sekertaris, Endang Kusmiati sebagai bendahara dan M.Zarnuji dan Siti Kalimah sebagai anggota, kami membuat rencana aksi rumah produksi di rumah saya, selanjutnya pengumpulan dana 300rb/anggota, pembelian bahan-bahan dan alat, mempersiapkan produksi, pemasaran, dan promosi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bisa di katakan bahwa Program Pemberdayaan PMI ini sangat dibutuhkan untuk PMI Purna dan Keluarganya dalam pelatihan kewirausahaan untuk

¹¹⁷ Suryati 40 tahun, Pekerja Migrasi Indonesia Purna dari Desa Sumber Sari Teluk Mataram Baru Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 16 Oktober 2018

mengembangkan kapasitas dan potensi diri dengan life skill kemampuan dari diri mereka untuk membuka usaha mandiri. Menjadikan potensi sumber daya manusia yang terkelola dengan maksimal juga mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan memberikan mereka pekerjaan. Untuk itu Fungsi dari BP3TKI dalam pemberdayaan dapat berjalan efektif dan efisien dan memanfaatkan dari minat dan keinginan PMI Purna dilanjutkan keterampilan mereka dalam mengoptimalkannya sebagai Sumber daya manusia yang terkelola dengan baik dan benar mampu memandirikan dan meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan PMI Purna sehingga menjadikan mereka masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

